

ISBN 978-602-51033-9-1



KARTUN DAN BERITA

Kartun yang hadir membawa konteksnya

[I Wayan Nuriarta]



Pusat Penerbitan
LP2MPP-ISI Denpasar

I WAYAN NURIARTA

KARTUN [DAN] BERITA

Kartun yang Hadir Membawa Konteksnya



PUSAT PENERBITAN LP2MPP
Institut Seni Indonesia Denpasar

Judul : **Kartun [Dan] Berita: Kartun yang Hadir Membawa Konteksnya**

Penulis: I Wayan Nuriarta

Editor: I Nyoman Payuyasa

Gambar Sampul: Nuriarta

Tata letak : I Gusti Ngurah Wirawan

Diterbitkan oleh:

Pusat Penerbitan LP2MPP ISI Denpasar

Jalan Nusa Indah Denpasar

Cetakan, Januari 2020

Hak Cipta © 2020 oleh I Wayan Nuriarta

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun tanpa ijin tertulis penulis dan penerbit.

Prakata

Pagi adalah ruang dan waktu yang menyenangkan bagi penulis untuk membaca berita di koran. Koran atau media cetak telah menjelma menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi penulis. Sepanjang tahun 2018, media massa (cetak) sibuk memberitakan percaturan perpolitikan tanah air (Indonesia). Singgungan-singgungan hiruk pikuk kampanye dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada menjadi topik berita yang sangat menarik dan hangat untuk dinikmati. Tingginya intensitas pemberitaan politik di media bisa dipahami karena tahun 2018 telah tumbuh menjadi tahun politik.

Tahun 2018 disebut sebagai tahun politik sebab terselenggaranya pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Rutinitas rakyat seperti terhenti sejenak karena fokus pada pesta demokrasi untuk memilih pemimpinnya masing-masing mulai bupati, wali kota

serta gubernur. Munculnya berbagai macam persoalan negeri yang penulis baca di media massa, membuat penulis semakin 'gelisah' untuk bisa beropini terhadap pemberitaan media tersebut. "Kegelisahan" inilah yang kemudian menuntun penulis untuk melahirkan karya-karya kartun.

Kartun penulis hadirkan untuk membagikan kegelisahan penulis kepada para pembaca. Kartun merupakan sebuah karya visual yang bersifat representatif atau simbolik. Kekuatan utama dari karya kartun terletak pada ide. Kartun-kartun yang penulis buat memiliki perbedaan dengan kartun-kartun yang telah ada selama ini. Kartun yang penulis buat tidak hanya menghadirkan gambar kartun yang memiliki narasi berupa opini penulis sebagai kartunis, namun kartun yang penulis tawarkan juga menghadirkan saksi/ konteks/ berita/ latar belakang dari narasi gambar yang penulis buat. Penulis membagi karya kartun ini menjadi tiga jenis kartun meliputi : (1) Kartun murni (gag cartoon) yaitu sebuah karya

kartun humor yang penulis hadirkan untuk lelucon ataupun humor yang bisa membuat pembaca tertawa saat melihat gambar tersebut tanpa muatan kritik apapun meski latar belakangnya tetap menghadirkan berita politik, (2) Kartun kritik/opini (editorial cartoon) adalah kartun yang penulis gunakan sebagai visualisasi opini penulis terhadap persoalan yang penulis baca pada media massa cetak. Kartun ini biasanya membicarakan masalah politik ataupun masalah-masalah aktual yang menjadi berita utama, dan (3) Kartun Wajah yaitu gambar kartun yang merepresentasikan wajah tokoh nasional/ internasional.

Awalnya penulis membuat kartun dengan cara mencoret-coret koran yang penulis baca, kemudian perlahan-lahan penulis menghadirkan kartun di atas koran. Kartun menjadi subjek gambar sedangkan koran sebagai latar belakangnya. Antara gambar dan latar belakang pada prinsipnya saling mendukung untuk menyampaikan pesan. Adapun karya-karya penulis ini hadir sejak

Januari 2018 melalui media sosial. Kartun ini adalah "kartun berita" yaitu kartun yang menyampaikan opini terhadap berita, dan berita sebagai sumber ide untuk melahirkan kartun. Kartun berita ini melahirkan tokoh kartun seperti Merdah TuaLEN, Pak NGIING dan juga kartun-kartun yang merupakan representasi ikon-ikon budaya Bali seperti penari Bali, Barong maupun sosok Celuluk. Karya-karya kartun inipun pernah dipamerkan di Pameran Kartun Sanur Festival 2018 dan juga pameran kartun lintas Negara pada acara Borobudur Cartoon Festival 2018.

Penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan YME. Perjalanan penulis dalam berkarya mendapatkan banyak masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pak Wied N. yang telah memperkenalkan kartun pada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan pada bli I Made Jango Paramartha (preseiden Kartun Indonesia tahun 2005-2010) atas cer-

itanya seputar dunia kartun, atas apresiasi, saran-kritiknya dan kesediaan bli Made untuk memberikan respon atas hadirnya buku ini, teman saya Komang Andri Sani (mahasiswa Program Doktor Linguistik Universitas Udayana-Bali) yang bersedia “membaca” karya penulis sebagai subjek penelitian, pak Cokorda Alit Artawan atas motivasinya, bli Ngurah Wirawan, Bli Astika, Bli Dw Budi dan Nyoman Payuyasa sebagai teman diskusi yang baik. Demikian juga ucapan khusus kepada istri yang selalu mendukung penulis secara penuh untuk ngartun. Salam Kartun.

Denpasar, November 2019

Penulis,

I Wayan Nuriarta

SemangArt, NURIARTA!

Saya mengenal Nuriarta, 5 tahun belakangan ini ketika sama-sama mengajar di kelas Kartun dan Ilustrasi Aplikatif di Jurusan Desain Komunikasi Visual-Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar), saya merasakan sebuah pertemuan yang berbeda yang harus terjadi pada sebuah system mengajar pada zaman *now*. Saya yang dibesarkan pada dunia kartun yang 'liar' di alam bebas dan Nuriarta dibesarkan dalam dunia 'seni formal' yang terstruktur di kampus perguruan tinggi. Pada setiap kesempatan mengajar, saya selalu banyak bercerita berbagai pengalaman saya di jagat raya seputar dunia kartun dan Nuriarta dengan sesama mengikuti cerita demi cerita...

Pada suatu saat saya melihat Nuriarta mulai memperkenalkan karya-karya kartunnya di sosial media-Facebook (FB)-dan Instagram, tapi waktu itu masih terkesan malu-malu...

dan saat itu saya hanya memberika tanda 'like' dan merespon "SemangART!". saya masih ingat yang selalu saya sampaikan kepada Nuriarta "sangat sulit sekali menemukan kartunis-kartunis muda baru yang berbakat. Kelemahannya pada zaman *now* ini, anak-anak muda tidak suka membaca, sehingga sulit sekali mendapatkan energy untuk memadukan 3 faktor penting dalam dunia kartun yaitu: Etika, Humor dan Estetika, seperti biasa Nuriarta hanya tersenyum dan selalu setia mendengarkan celoteh saya.

Pada akhirnya, saya dikagetkan oleh karya-karya Nuriarta dengan tokoh 'TUA-LEN' DI FB maupun Instagram. Bagi saya, karya ini sangat spesifik dengan segala keunikannya. Nuriarta berhasil membuat Khas pada karyanya dengan memadukan kartun yang dipadukan dengan seni grafis dengan meng-kolase-kan berita-berita Koran yang dianggap sebagai inspirasi untuk membuat dia berkarya. Cukup lama juga saya mencari istilah untuk meng-apresi-

asikan karya-karya Nuriarta saat itu, sampai-sampai saya harus bercerita dengan Darminto M. Sudarmo, seorang pengamat kartun dari Lembaga Humor Indonesia (LHI).

Nuriarta BERHASIL, me-ngartunkan sebuah peristiwa yang sekaligus menghadirkan saksi-saksinya (berupa kliping-kliping Koran tersebut). Itulah kalimat 'salut' yang sementara bisa saya berikan pada karya-karya Nuriarta saat ini. Tentunya dari beberapa karya Nuriarta, saya juga harus berikan kritik, bahwa karya-karya Nuriarta untuk tidak terjebak pada sebuah karya ilustrasi biasa. Saya sangat menginginkan X-Faktor humornya harus terus digali untuk dipadukan dengan etika (intelegenssi) dan estetika (seni).

Gesitnya Nuriarta mencari informasi seputar dunia kartun Tanah Air pada langkah selanjutnya sangat saya apresiasi sebagai langkah positif membangun Kreatif-ART-nya. Mengikuti Borobudur Cartoon Forum 2 (BCF2),

Pameran dan menulis seputar dunia kartun sungguh membuat saya ikut lega sebagai bagian generasi *old* dunia kartun Indonesia! Sebagai akhir kata, selamat atas diluncurkannya buku "Kartun dan Berita", semoga bisa jadi pemicu baru dalam perkembangan dunia seni kartun Indonesia.

SmangArt,
Denpasar, 22 Desember 2019

Drs. Made Gede Parama Artha
Presiden Kartun Indonesia 2005-2010.

Daftar ISI

Prakata	(1)
I Wayan Nuriarta	
SemangArt Nuriarta.....	(4)
Drs. Made Gede Parama Artha Presiden Kartun Indonesia 2005-2010.	
Daftar Isi	(6)
Pengertian Kartun	(7)
Kartun Humor	(9)
Kartun Opini	(22)
Kartun Wajah	(69)
Kepustakaan	

PENGERTIAN KARTUN

Gambar kartun merupakan sebuah karya visual yang bersifat representasi atau simbolik. Kekuatan utama dari sebuah kartun terletak pada ide. Saat ini gambar-gambar kartun dengan sangat mudah bisa kita temui pada media massa cetak atau Koran, karena setiap koran pasti memiliki rubrik kartunnya tersendiri. Bahkan setiap koran memiliki tokoh kartunnya masing-masing.

Kartun sebagai sebuah karya visual memiliki 'tugas' untuk menghadirkan humor atau tawa bagi pembacanya. Sesuai dengan pendapat Sudarta, kartunis yang melahirkan kartun Oom Pasikom menyampaikan bahwa kartun adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. Konsep kartun yang lebih memadai adalah gambar yang bersifat representasi atau simbolik yang mengandung unsur sindiran, lelucon atau humor. Kartun muncul dalam publikasi secara periode, dan paling ser-

ing menyoroiti masalah politik atau masalah publik. Namun, masalah-masalah sosial budaya juga menjadi target dengan mengangkat kebiasaan hidup masyarakat, peristiwa olahraga, atau mengenai kepribadian seseorang (Setiawan, 2002; 33).

Noerhadi di dalam artikelnya yang berjudul Kartun dan Karikatur sebagai wahana kritik sosial (dalam Wijana, 2003:7) mendefinisikan kartun sebagai suatu bentuk tanggapan lucu dan citra visual. Dalam artikel ini konsep kartun dipisahkan secara tegas dengan karikatur. Tokoh-tokoh kartun bersifat fiktif yang dikreasikan untuk menyajikan komedi-komedi sosial serta visualisasi jenaka. Tokoh-tokoh karikatur adalah tokoh-tokoh tiruan mealui pemiuhan (*distortion*) untuk memberikan persepsi tertentu kepada pembaca sehingga sering kali disebut *portraitcaricature*.

Berdasarkan konsep-konsep kartun yang telah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan kata kunci pemahaman kartun yang merupa-

kan gambar bermuatan humor atau satir dalam berbagai media massa dengan tokoh-tokoh yang bersifat fiktif (Wijana, 2003:xx).

Kartun Nuriarta

Ada dua hal yang mendasari lahirnya Kartun Berita karya penulis. Pertama, pada tahun 2014 sampai tahun 2018, Hoaks atau berita bohong sangat marak di Indonesia. Berita ini meningkat seiring dengan kehadiran Pemilihan presiden tahun 2014, Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 dan 2018. Hoaks menjadi isu berita nasional yang hampir setiap hari dapat kita baca, hoaks menjadi makhluk buas yang bisa memporakporandakan persatuan, membuat persepilihan dan permusuhan. Untuk menghindari hoaks, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menghadirkan berita dari sumber yang terpercaya. Menghindari berita-berita dari sumber yang tidak jelas atau abal-abal.

Kedua, Saat membaca kartun-kartun karya GM Sudarta dan Pramono tahun-tahun 80-

an, saya mengalami kesulitan untuk membacanya, karena konteks peristiwa sudah berlalu. Pembaca kartun kecenderungan tidak mampu untuk menangkap pesan (humor atau kritik) sebuah kartun jika konteksnya tidak diketahui, dan ini terjadi pada saat penulis membaca kartun-kartun “lawas”. Atas dasar dua pertimbangan tersebut,



Awal kehadiran kartun berita karya penulis, 2017

penulis kemudian mencoba untuk membuat karya kartun yang dapat “diper tanggungjawabkan”, tidak hoaks dan dapat dibaca kapan saja karena kartun yang hadir membawa saksinya tersendiri. Saksi yang berupa berita di Koran/majalah menjadi pengetahuan awal untuk masuk pada kartun.

Karya-karya kartun penulis sempat diulas di

media masa cetak ataupun online. Karyanya dibaca sebagai karya kartun “baru” dengan menghadirkan saksi dalam karyanya.

Penulis membedakan karya dalam buku ini menjadi tiga jenis kartun yang melibatkan saksi (berita), yaitu: kartun humor, kartun opini dan kartun wajah.

KARTUN HUMOR

Kartun Humor (*gag cartoon*) adalah sebuah kartun murni yang biasanya menghadirkan lelucon ataupun humor yang bisa membuat pembacanya tertawa saat melihat gambar tersebut. Beberapa unsur humor yang biasanya digunakan dalam kartun yaitu; a) Eksagerasi, yaitu kelucuan dengan cara melebih-lebihkan ukuran fisik seperti hidung yang dibuat panjang, tubuh yang tambun. Eksagerasi merupakan teknik paling sederhana dalam menghadirkan kelucuan; b) kekeliruan, merupakan humor yang diban-

gun dengan memanfaatkan kekeliruan gestural atau kekliruan lain yang mempunyai dimensi visual. Adapun contoh humornya seperti misalnya seekor landak yang keliru memperkirakan pohon kaktus sebagai landak yang lain dan berkata kepadanya “aku cinta kamu”; c) permainan kata yang digambarkan (*Visual Puns*), merupakan bagian dari permainan bahasa dan turunan dari gambar-gambarnya; dan d) kiasan bernada humor biasanya dilakukan dengan mempermainkan sejarah, legenda, tokoh mitologi atau kejadian-kejadian tertentu yang ada dalam pikiran masyarakat sebagai efek komikal. Sebagai contoh seorang politikus digambarkan seperti Raksasa, Bhuto Ijo atau Pinokio.

Pilih yang Positif, Negatif, atau Hitam?



Pilih Kamu, 30 cm x 42 cm

KRIMINAL

Banyak Cara Membobol ATM

Wisnu Aji Dewabrata

Pembobolan mesin ATM Eropa dan Timur menggunakan sebagian besar uang curian yang dipikirkan miliaran rupiah itu untuk membeli bitcoin sehingga sulit dilacak. Direktur Risetse Kriminal Komisi Nasional Penanggulangan Bencana, Kadi Santia, Pondok Kaki. Itu ternyata mesin pencari dari perobohan Jalan Marjorie Sim, Depok pada pagi ini. Para pelaku diidentifikasi untuk membobol ATM, pelaku menargetkan informasi kermahalan menggunakan "curian data".

Modus paling anyar adalah menggunakan data nasabah ATM. Cara ini sudah banyak dilakukan. Cara yang lain menggunakan kamera mini yang bisa diarahkan ke mesin ATM. Cara ini sudah banyak digunakan. Cara ini sudah banyak digunakan. Cara ini sudah banyak digunakan.

Untung ATM Nanang Gak Dibobol...

...pasti karena KASIAN Nanang...



KRIMINAL

Banyak Cara Membobol ATM

Wisnu Aji Dewabrata

Pembobolan mesin ATM Eropa dan Timur menggunakan sebagian besar uang curian yang dipikirkan miliaran rupiah itu untuk membeli bitcoin sehingga sulit dilacak. Direktur Risetse Kriminal Komisi Nasional Penanggulangan Bencana, Kadi Santia, Pondok Kaki. Itu ternyata mesin pencari dari perobohan Jalan Marjorie Sim, Depok pada pagi ini. Para pelaku diidentifikasi untuk membobol ATM, pelaku menargetkan informasi kermahalan menggunakan "curian data".

Modus paling anyar adalah menggunakan data nasabah ATM. Cara ini sudah banyak dilakukan. Cara yang lain menggunakan kamera mini yang bisa diarahkan ke mesin ATM. Cara ini sudah banyak digunakan. Cara ini sudah banyak digunakan.

kok...??

Pembobolnya SEDIH liat saldo Nanang*...



Nanang=Ayah

ATM, 30 cm x 42 cm

JAMINAN KESEHATAN

Kualitas Layanan untuk Peserta JKN Belum Optimal

JAKARTA (10/10/2018) - Bulan-bulan belakangan ini, keluhan-raport kesehatan masyarakat kian meningkat. Hal itu mengkonfirmasi munculnya beragam keluhan peserta JKN. Contohnya, penetapan kuota peserta layanan rumah sakit, kesulitan membayar perawatan intensif, dan membeli obat

layanan primer. Hal itu menculnya beragam keluhan peserta JKN. Contohnya, penetapan kuota peserta rumah sakit, layanan bagi kesulitan membayar perawatan intensif, dan membeli obat

Saya kok
gak dapat biaya
perawatan dari JKN
padahal sakit...



Ah....?
Sakit apa??



...din, Senin (9/4/2018), di Jakarta, mengatakan... silitas... layanan... peserta... tenaga... kesehatan... tinggalnya, tenaga kesehatannya berkompeten, dan fasilitasnya menunjang. Zaenal mencontohkan, di Natuna hanya ada satu puskesmas sebagai FKTP yang buka hanya sampai pukul 14.00. Akibatnya, masyarakat yang akan mengakses di luar jam kerja itu menjadi menumpuk di unit gawat darurat

tinggalnya, tenaga kesehatannya berkompeten, dan fasilitasnya menunjang. Zaenal mencontohkan, di Natuna hanya ada satu puskesmas sebagai FKTP yang buka hanya sampai pukul 14.00. Akibatnya, masyarakat yang akan mengakses di luar jam kerja itu menjadi menumpuk di unit gawat darurat

...di RS terdekat. ...sabah kerja BPJS... FKTP... Deputi... Aceh Bu... nyatakan... kecamatan... pencil da

spesialis... FKTP... lum k... nosis 14... Deputi... an Wil... Aceh Bu... nyatakan... kecamatan... pencil da

Sakit Hati Ditinggal Pergi
oleh Gek Ayu Nang,....

sabar
Dah,....



8
11
nu
ke him 15

JKN, 30 cm x 42 cm



Regenerasi Peternak Sapi Perah Mandek

Pemerintah dan swasta perlu mendorong generasi muda untuk terlibat dalam usaha peternakan sapi perah. Usaha ini diyakini memiliki prospek besar, tetapi wawasan kaum muda perlu diberi pencerahan.

SEMARANG, KOMPAS.com — Anak muda yang berminat melakukan usaha peternakan sapi perah sangat sedikit. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah terus-menerus mengalami penurunan. Peternak sapi perah yang sudah tua, lambat laun akan pensiun. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah mengalami penurunan. Peternak sapi perah yang sudah tua, lambat laun akan pensiun. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah mengalami penurunan. Peternak sapi perah yang sudah tua, lambat laun akan pensiun. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah mengalami penurunan.

lata Evi saat diteliti dari Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/2/2018). Menurut Susanto (2011), peternak sapi perah yang sudah tua, lambat laun akan pensiun. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah mengalami penurunan. Peternak sapi perah yang sudah tua, lambat laun akan pensiun. Akibatnya, regenerasi peternak sapi perah mengalami penurunan.

Regenerasi Peternak Sapi Perah Mandek

Pemerintah dan swasta perlu mendorong generasi muda untuk terlibat dalam usaha peternakan sapi perah. Usaha ini diyakini memiliki prospek besar, tetapi wawasan kaum muda perlu diberi pencerahan.

JUAL SUSU SEGAR



● nuriarta 2018

Susu Segar, 30 cm x 42 cm

Pariwisata Bali Aman

Meski erupsi Gunung Agung terjadi setiap hari dan Bandara Ngurah Rai sempat ditutup, pariwisata Bali aman. Tingkat hunian hotel 70-90 persen. Mitigasi warga lingkaran gunung tetap berjalan.

KARANGASEM, KOMPAS — Meski erupsi Gunung Agung terjadi setiap hari, pariwisata Bali masih aman. Arah angin dominan ke barat sehingga kolom abu vulkanik akibat erupsi setinggi 5000-1.500 meter tidak mengancam kawasan perbukitan di Bandara Ngurah Rai, 13 kilometer dari puncak. Ketua pariwisata Bali Partha Kusuma mengatakan, wisatawan

SEXY



bersedia erupsi Gunung Agung. Selama sepekan, pihaknya meng- evaluasi dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karangasem terus menjemput bola, memitigasi warga hingga me- nyiapkan evakuasi sementara in- termediet. Kini erupsi ber- berjalan sejak 11 November abunya melontarkan lava pijar dan me- bubungkan abu vulkanik setinggi 500-1.500 meter.

Pelaksana Tugas I- rangkai dan Penanganan Daru- ras Nasional Penanggulangan B- ahan Berbahaya Volak Dalimunteh, k- ah mengatakan, pihaknya telah ad- alampingi penang- gulan

erupsi terjadi di hotel... mencapai Bandara Ngurah Rai... beberapa jam... berdatangan dari... Media berperan... informasi dan ph... pesisir itu." katanya... Minggu (8/7/2018), Gunung Agung meletus tiga kali... 500-1.500 Wita, Letusan... lava pijar dan meni... abu vulkanik setinggi... meter.

bersedia erupsi Gunung Agung. Selama sepekan, pihaknya meng- evaluasi dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karangasem terus menjemput bola, memitigasi warga hingga me- nyiapkan evakuasi sementara in- termediet. Kini erupsi ber- berjalan sejak 11 November abunya melontarkan lava pijar dan me- bubungkan abu vulkanik setinggi 500-1.500 meter.



erupsi terjadi di hotel... mencapai Bandara Ngurah Rai... beberapa jam... berdatangan dari... Media berperan... informasi dan ph... pesisir itu." katanya... Minggu (8/7/2018), Gunung Agung meletus tiga kali... 500-1.500 Wita, Letusan... lava pijar dan meni... abu vulkanik setinggi... meter.

juga sama, 4 kilometer dari ka- rawa, warga ada yang mengun- poki. Mereka khawatir melihat kolom abu vulkanik yang terlontar dan lelehan lava pijar Gunung Agung serta getaran gempa yang terasa setiap hari.

Volak Dalimunteh, k- ah mengatakan, pihaknya telah ad- alampingi penang- gulan erupsi terjadi di hotel... mencapai Bandara Ngurah Rai... beberapa jam... berdatangan dari... Media berperan... informasi dan ph... pesisir itu." katanya... Minggu (8/7/2018), Gunung Agung meletus tiga kali... 500-1.500 Wita, Letusan... lava pijar dan meni... abu vulkanik setinggi... meter.

dari gunung yang 54 tahun... Karena itu, warga lingkaran... harus dimitigasi secara ru- merintah setempat juga segera mewujudkan ban- mentara untuk para per- dekat ling...

Volak Dalimunteh, k- ah mengatakan, pihaknya telah ad- alampingi penang- gulan erupsi terjadi di hotel... mencapai Bandara Ngurah Rai... beberapa jam... berdatangan dari... Media berperan... informasi dan ph... pesisir itu." katanya... Minggu (8/7/2018), Gunung Agung meletus tiga kali... 500-1.500 Wita, Letusan... lava pijar dan meni... abu vulkanik setinggi... meter.

ini rata-rata 70 persen. Bahkan, mengatakan, pihaknya tetap Pusat Vulkanologi dan Mitigasi... tuk melihat serta menjadi ter- run tangan mengoordinas...

Bali Sexy 1, 36 cm x 44 cm

PERLAWANAN DOKTER TERAWAN

KEPALA Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Mayor Jenderal Terawan Agus Putranto, tak tinggal diam atas putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang mencabut izin praktiknya. Ia mempertimbangkan menggugat lewat jalur hukum atas terbitnya putusan tersebut. "Saya tak tahu apa yang saya langgar, dan siap jika mengkaji hukum putusan itu," kata Terawan dalam pertemuan dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat di kantornya, Rabu pekan lalu.

Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara Terawan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Putusan itu terkait dengan teknik "cuci otak" yang diterapkan Terawan sejak 2004. Metode ini membersihkan sumbatan di saluran darah otak menggunakan heparin dan membuat pembuluh darah kembali normal sehingga aliran darah menjadi lancar. Teknik ini disebut-sebut bermanfaat untuk penyakit *stroke*, hipertensi, aneurisme, kanker, dan masalah pembuluh darah lain.

Sejumlah kalangan menganggap metode ini belum teruji secara ilmiah. Menurut Terawan, teknik "cuci otak" menggunakan mesin *digital subtraction angiography* sudah teruji secara ilmiah dan mampu menyembuhkan ratusan orang dari dalam dan luar negeri.

Beberapa kalangan nasional pun mendukung Terawan. "Saya menjadi saksi ribuan saudara kita tertolong oleh dokter Terawan," ujar mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md., mengatakan pernah menjadi pasien Terawan. "Ada gejala *stroke*, ketahuan, lalu dipompa agar bersih, langsung seger."

Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pukovisa Prawiroharjo mengatakan Terawan bisa menggugat putusan tersebut. "Kalau mau ditinjau kembali, sebaiknya mengikuti mekanisme MKEK," katanya. Sedangkan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan persoalan ini harus diselesaikan oleh IDI, Majelis Kehormatan, dan Terawan sendiri.



PERLAWANAN DOKTER TERAWAN

KEPALA Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Mayor Jenderal Terawan Agus Putranto, tak tinggal diam atas putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang mencabut izin praktiknya. Ia mempertimbangkan menggugat lewat jalur hukum atas terbitnya putusan tersebut. "Saya tak tahu apa yang saya langgar, dan siap jika mengkaji hukum putusan itu," kata Terawan dalam pertemuan dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat di kantornya, Rabu pekan lalu.

Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara Terawan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Putusan itu terkait dengan teknik "cuci otak" yang diterapkan Terawan sejak 2004. Metode ini membersihkan sumbatan di saluran darah otak menggunakan heparin dan membuat pembuluh darah kembali normal sehingga aliran darah menjadi lancar. Teknik ini disebut-sebut bermanfaat untuk penyakit *stroke*, hipertensi, aneurisme, kanker, dan masalah pembuluh darah lain.



Radiologi, 30 cm x 42 cm

PANAHAN

Tim "Merah Putih" Berpeluang Raih Dua Medali Emas

JAKARTA, KOMPAS – Tim panahan Indonesia berpeluang meraih dua medali emas di nomor *compound* beregu putri dan *recurve* perseorangan putra pada uji coba Asian Games 2018. Peluang meraih emas bisa bertambah jika tim campuran *compound* dan *recurve* tampil menonjol pada penyisihan.

Tim *compound* diwakili oleh wakil Indonesia yang lolos ke final salah satu negara...

Tim "Merah Putih" berpeluang menambah pelatuk emas (medali emas) karena nomor beregu putra di nomor beregu putra pada uji coba Asian Games 2018. Peluang meraih emas bisa bertambah jika tim campuran *compound* dan *recurve* tampil menonjol pada penyisihan.

Namun, tim panahan Indonesia untuk Asian Games 2018 baru dimulai Maret, yaitu pada Piala Asia Stage 1 di Bangkok. Riau Ega dan kawan-kawan juga akan tampil di dua seri Piala Dunia Panahan, yaitu di China dan Turki pada April serta Mei. (JOS)

..ikut Asian Games paman,,,

Gusti Arjuna akan kemana??



nuriarta 2018

Panahan, 30 cm x 42 cm

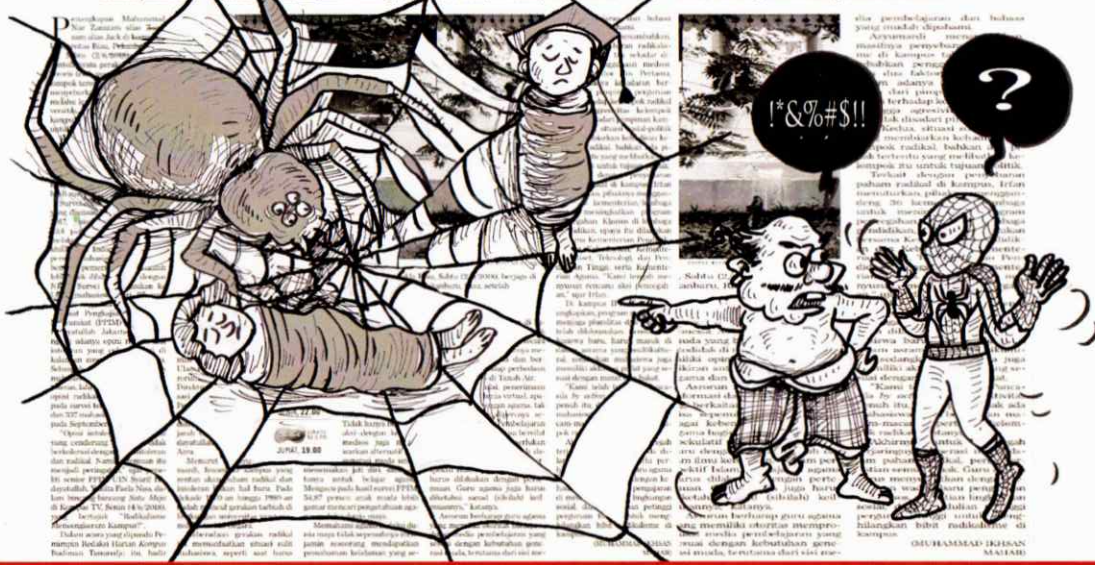


Valentine, 30 cm x 42 cm

Jaring Radikalisme di Kampus di Kampus

Penangkapan tersangka di kompleks kampus Universitas beberapa waktu lalu perlu jadi perhatian semua pihak atau pejabat, bukan radikal, kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.

beberapa waktu lalu perlu jadi perhatian rasi muda, khususnya mahasiswa.



Jaring(an), 30 cm x 42 cm

KARTUN OPINI

Pramoedjo (2008) berpendapat bahwa sebenarnya karikatur adalah sebagian dari kartun khususnya jenis kartun opini. Karikatur yang sudah diberi muatan pesan dan kritik, berarti telah menjadi kartun opini. Kartun yang membawa pesan kritik sosial, yang dimuat pada setiap penerbitan surat kabar adalah political cartoon atau editorial cartoon, yakni versi lain dari editorial atau tajuk rencana dalam bentuk gambar humor. Inilah yang bisa disebut dengan karikatur.

Seperti media massa cetak yang selalu memiliki rubrik opini yang menghadirkan tulisan sebagai sebuah pendapat dari masyarakat. Tulisan-tulisan atau opini tersebut disampaikan dengan teks verbal/ lewat kata-kata. Pada kartun opini sesungguhnya memiliki kesamaan, yaitu sebuah gambar kartun yang menghadirkan pendapat/ opini kartunis (representasi masyarakat) untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut seringkali

merupakan kritik. Pendapat disampaikan dengan teks visual atau gambar. Kata-kata kemudian menjadi pendukung untuk menguatkan isi pesan. Pembaca dapat mengetahui isi pesan dengan membaca gambar yang disuguhkan.

Jadi kartun opini merupakan gambar kartun yang berisi muatan kritik/opini masyarakat/ kartunis dengan balutan humor. Sehingga kritik dapat diterima dengan tawa/senyum.

Mencari Kader Parpol di Pilkada

Pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 seharusnya menjadi ajang pertarungan kader terbaik dari masing-masing partai politik. Namun, yang lebih menonjol diusung di pilkada tersebut justru sosok populer yang bukan berasal dari kader partai politik.



Hasil Pilihan, 30 cm x 42 cm

Kampanye Hitam Muncul

nuri
arta
2018

Kampanye hitam dan praktik politik uang berpotensi memicu konflik di Pilkada 2018. Upaya serius perlu dilakukan untuk mengantisipasi kedua hal itu.

JAKARTA, KOMPAS — Kampanye hitam di media sosial untuk menjatuhkan calon atau partai politik tertentu mulai muncul di Pilkada 2018.

Kampanye hitam itu, antara lain, telah terjadi di Pilkada Jawa Barat. Salah satu bakal calon gubernur di provinsi tersebut, Kamil, dalam kampanye dan kontes gap memihak saat tertentu. Foto-foto dan video-bubuh komentar.

"Kami belum porkan akan melakukan kampanye menyerang pihak lain. Kami berharap pihak Badan Pengawas Pemilu, kepolisian, dan aparat lain," kata Ketua DPW Pemuda Jawa Barat (PJPB) di Bandung, Nuzul, yang mengungkapkan salah satu kampanye yang dilakukan oleh pasangan lain di Pilkada 2018, yaitu Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan, berupaya meng-

antisipasi serangan kampanye hitam di media sosial dengan membentuk tim patroli siber.

Salah satu upaya yang dilakukan tim patroli siber adalah memantau dan melaporkan konten-konten negatif yang beredar di media sosial. Selain itu, tim patroli siber juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kampanye hitam dan praktik politik uang.

Umum Daerah Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan, pihaknya telah membentuk tim patroli siber yang bertugas memantau dan melaporkan konten-konten negatif yang beredar di media sosial.

Salatiga Nusantera, Pakan depan, Polri mulai mengedukasi Satuan Tugas Nusantera yang ada di 20 kabupaten/kota untuk mengantisipasi provokasi bermuatan SARA. "Sebelumnya, 20 polka tempo Satgas Nusantera bertugas terdiri dari 17 provinsi yang melakukan pemantauan dan pelaporan konten-konten negatif yang beredar di media sosial. Selain itu, tim patroli siber juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kampanye hitam dan praktik politik uang."



.....
mikir
.....

Kalimat-kalimat tersebut diunggah di media sosial dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. "Kami akan melakukan kampanye hitam dan praktik politik uang yang merugikan masyarakat," kata Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Hito Karim, dalam kampanye di Kabupaten Pangajene Areneae, Sulawesi Selatan.

Kampanye hitam dan praktik politik uang yang merugikan masyarakat, lanjutnya, bisa dilakukan langsung oleh calon kepala daerah atau tim sukses.

"Oleh karena itu, kami akan memantau relasi setiap calon kepala daerah sehingga bisa mengantisipasi dan mengindera agar pasangan calon dan tim suksesnya menghindari politik uang," katanya. Pengawasan hukum bagi pelaku politik uang, kata Ari, akan dikordinasikan dengan sentra penegakan hukum terpadu pada Pilkada 2018. (SAN/BKY/SEM, TAM/DD07/BB03)

Kampanye Hitam, 30 cm x 42 cm

Hindari Politik Uang

Dana besar yang harus dibayar calon gubernur/wakil gubernur dalam pilkada serentak 2018 tak terhindarkan. Namun, diingatkan agar hal itu tidak lantas membuat para calon untuk membeli suara pemilih.



Politik Uang, 30 cm x 42 cm

Poros Ketiga Berpeluang Muncul

Hingga saat ini belum ada sosok yang elektabilitasnya mendekati Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun Pemilu 2019 tetap terbuka kemungkinan diikuti tiga pasangan calon.



Poros Ketiga Berpeluang Muncul

...Pilih Partai PHP, nomor O,...

...coblos Paket MERTUA



JAKARTA, KOMPAS — Meski kini para pemilih cenderung mengabaikan pada pemertualan dan pasangan calon, Pemilihan Presiden 2019 masih berpeluang diikuti tiga pasangan calon. Hingga saat ini belum ada sosok yang elektabilitasnya mendekati Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun Pemilu 2019 tetap terbuka kemungkinan diikuti tiga pasangan calon.

Menurut pengamatan Kompas, pasangan calon yang paling mungkin muncul adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun, pasangan calon lain juga memiliki peluang untuk muncul.

Salah satunya adalah pasangan calon yang diusung oleh Partai Persatuan Indonesia (PDI Perjuangan). Pasangan calon ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga memiliki peluang untuk muncul.

Keberhasilan pasangan calon lain untuk muncul tergantung pada seberapa banyak pemilih yang memilih mereka. Hingga saat ini, pasangan calon lain masih memiliki peluang yang cukup besar untuk muncul.

Keberhasilan pasangan calon lain untuk muncul tergantung pada seberapa banyak pemilih yang memilih mereka. Hingga saat ini, pasangan calon lain masih memiliki peluang yang cukup besar untuk muncul.

JAKARTA, KOMPAS — Meski kini para pemilih cenderung mengabaikan pada pemertualan dan pasangan calon, Pemilihan Presiden 2019 masih berpeluang diikuti tiga pasangan calon. Hingga saat ini belum ada sosok yang elektabilitasnya mendekati Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun Pemilu 2019 tetap terbuka kemungkinan diikuti tiga pasangan calon.

Menurut pengamatan Kompas, pasangan calon yang paling mungkin muncul adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun, pasangan calon lain juga memiliki peluang untuk muncul.

Salah satunya adalah pasangan calon yang diusung oleh Partai Persatuan Indonesia (PDI Perjuangan). Pasangan calon ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga memiliki peluang untuk muncul.

Keberhasilan pasangan calon lain untuk muncul tergantung pada seberapa banyak pemilih yang memilih mereka. Hingga saat ini, pasangan calon lain masih memiliki peluang yang cukup besar untuk muncul.

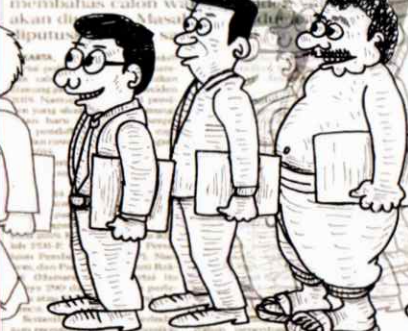
Keberhasilan pasangan calon lain untuk muncul tergantung pada seberapa banyak pemilih yang memilih mereka. Hingga saat ini, pasangan calon lain masih memiliki peluang yang cukup besar untuk muncul.

Partai Kita Partai PHP, 30 cm x 42 cm

nuriarta 2018

Cawapres Ditentukan pada Saat Terakhir

Sejumlah partai politik dan calon presiden pada Pemilu 2019 intensif membahas calon wakil presiden yang akan dipilih.



Wakil Sekretaris Jenderal karena Gerindra tengah ber...

Cawapres Ditentukan pada Saat Terakhir

(Sambungan dari halaman 1)

Kesatuan Republik Indonesia, pendamping Jokowi antara lain juga harus punya visi dan misi yang sejalan dengan Jokowi. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan bangsa. Di...

PDI-P Ahmad Basarah menduga kepastian cawapres Jokowi akan ditentukan pada saat terakhir...

ya membangun komunikasi dengan empat partai lain yang belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada 2019. ...nya ...ar-nya ...lah ...meng-kan-nya ...Perlu ...untuk ...perku-... ...



Jenderal karena Gerindra tengah ber...

...antre Indonesia Idol ya Nang?

...daftar CAWAPRES ...



nuriarta 2018

Cawapres, 30 cm x 42 cm

Koalisi Partai Teramat Rapuh

Koalisi partai dinilai hanya dibangun untuk kemenangan Pemilu 2019. Koalisi semacam ini akan sangat rapuh dan berpotensi pecah jika keadaan jadi tidak menguntungkan.

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi partai politik untuk Pemilu Presiden 2019 berpotensi membuat penguatan sistem presidensial akan kembali sulit tercapai pada periode pemerintahan berikutnya. Padahal, seharusnya partai-partai politik belajar dari pengalaman pemerintahan yang berkuasa saat ini dan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Demokrasi, Nuriarta, menilai koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. "Koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. "Koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan."

yang diusung pada pemilu berikutnya tetap ada. Padahal, seharusnya partai-partai politik belajar dari pengalaman pemerintahan yang berkuasa saat ini dan sebelumnya. "Koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan."

sejumlah elite yang mendominasi partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi. Selain itu, koalisi Partai Gerindra dan Partai Golkar yang dipimpin oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, juga dinilai rapuh. "Koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan."

diri melihat, tak tertutup kemungkinan pula koalisi yang terbentuk saat ini pecah. Pendaftaran capres/cawapres akan digelar pada Agustus 2018. "Jika nanti koalisi partai politik yang dibentuk untuk menghadapi pemilu 2019, melampaui batas kemampuan koalisi partai politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan."



...ada uang,
Bli disayang,
tak ada uang,
Bli di.....



...serapuh itukah
Koalisi kita
Gek???

nuriarta 2018

Koalisi, 30 cm x 42 cm



HAKIM TANGERANG TERSANGKA SUAP

KORUPSI adalah kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting. Salah satu kasus yang menarik adalah dugaan suap oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Menurut laporan, Hakim tersebut diduga menerima suap dari pihak-pihak tertentu untuk memenangkan perkara-perkara tertentu. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, KPK harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Selain itu, masyarakat juga harus lebih waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi. Dengan demikian, diharapkan proses peradilan berjalan dengan adil dan jujur. Kita semua harus bersama-sama menegakkan hukum dan menegakkan moralitas. Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat berkembang dan maju. Terima kasih.

...silakan sampaikan... apa permintaan tuanku??

...aku ingin..... menguasai dunia..

...menguasai diri saja tuanku belum mampu, bagaimana mungkin bisa menguasai Dunia??



Pilkada Para Tersangka

Judul tersebut boleh jadi tidak sepenuhnya tepat. Namun, judul itu dipilih untuk menggambarkan kegeraman publik akan situasi kebangsaan kita akhir-akhir ini.

...menguasai diri saja tuanku belum mampu, bagaimana mungkin bisa menguasai Dunia??



nuriarta '2018

Kuasai Diri, 30 cm x 42 cm

2 Politik & Hukum

Penambahan Picu Masalah

Masalah redaksional terjadi terkait dengan penambahan tiga kursi wakil ketua MPR di Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Persoalan ini makin menambah daftar masalah di UU yang memicu kontroversi tersebut.



Picu Masalah?, 30 cm x 42 cm



UNDANG-UNDANG ANTIKRITIK DPR BERLAKU

UNDANG-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3 efektif berlaku sejak Kamis pekan lalu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memorninya sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Kementerian Hukum mengesahkan peraturan tersebut meski Presiden Joko Widodo tak menandatangani. "Kenapa tidak saya tanda tangani, karena menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu pekan lalu.

UNDANG-UNDANG ANTIKRITIK DPR BERLAKU

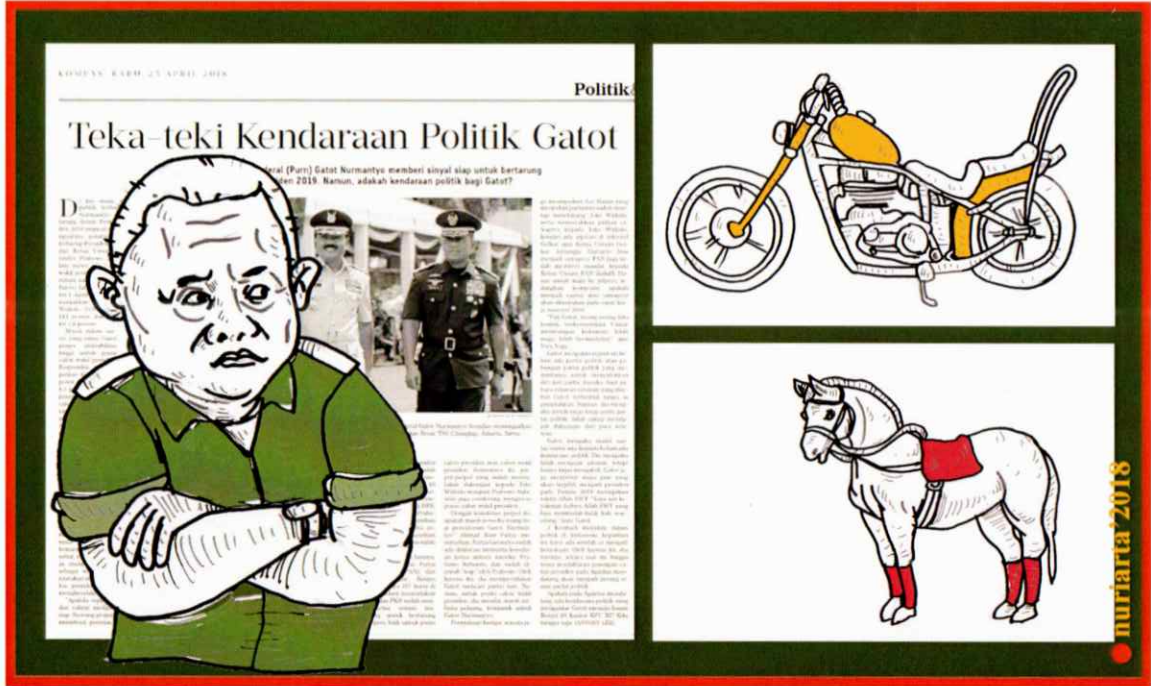
UNDANG-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3 efektif berlaku sejak Kamis pekan lalu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memorninya sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Kementerian Hukum mengesahkan peraturan tersebut meski Presiden Joko Widodo tak menandatangani. "Kenapa tidak saya tanda tangani, karena menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu pekan lalu.

Undang-Undang MD3 yang baru dianggap mengancam demokrasi. Sejumlah pasal baru membuat DPR seakan-akan menjadi lembaga *superpower* yang antikritik. Misalnya, pasal 122 huruf K menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan DPR. ●



nuriarta '2018



Pilihan?, 30 cm x 42 cm



Gelar Gelur, 30 cm x 42 cm

Mahasiswa Asing Kenali Politik Indonesia Lewat Kartun



Humor, 30 cm x 42 cm

TAJUK RENCANA

Cacing dalam Ikan Kalengan

Respons pemerintah yang tidak sat nada dalam menyikapi adanya potongan cacing mati di dalam produk ikan di kaleng membingungkan masyarakat.

Pada 23 Maret 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan mengemukakan hasil uji produk ikan dalam kaleng. Ditemukan potongan cacing mati dalam 27 merek ikan dalam kaleng yang berasal dari dalam negeri dan impor. Produsen dan importir ikan dalam kaleng diminta menarik dan memusnahkan produk mereka. Bahan baku dari China yang terlarang masuk dibarengi digunakan sampai ada hasil lebih lanjut dari penelitian.

Pada sisi lain, otoritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam manajemen keamanannya (dalam ikan kaleng) tidak menjadi potensi bahaya kaleng yang di dalamnya terdapat potongan cacing (Kompas, 2/4).

Rapat koordinasi pertemuan kedua lembaga tersebut dapat menghasilkan kebingungan masyarakat.

Sebelumnya, telah ditetapkan prosedur penanganan cacing yang terdapat dalam kaleng ikan. Namun, prosedur ini belum pernah diterapkan dalam kaleng ikan yang terdapat potongan cacing.

Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan surat edaran kepada produsen dan importir ikan dalam kaleng yang terdapat potongan cacing.

Surat edaran tersebut berisi perintah untuk menarik dan memusnahkan produk ikan dalam kaleng yang terdapat potongan cacing.

Surat edaran tersebut juga berisi perintah untuk melakukan investigasi penyebab terdapatnya potongan cacing dalam kaleng ikan.

Surat edaran tersebut juga berisi perintah untuk melakukan investigasi penyebab terdapatnya potongan cacing dalam kaleng ikan.

Surat edaran tersebut juga berisi perintah untuk melakukan investigasi penyebab terdapatnya potongan cacing dalam kaleng ikan.

CACING DI IKAN KALENG

Karantina Tingkatkan Kewaspadaan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menerapkan uji parasit terhadap ikan beku dan produk ikan di kaleng. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap bahan baku di kaleng.

Kepala Pusat Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, sejak Januari 2018 pihaknya menyiapkan karantina perikanan di perikanan impor ikan beku.

Survei uji parasit pada ikan beku tersebut setelah ada notifikasi dari produsen ikan kaleng yang ditemukan dalam produk ikan di kaleng yang masuk ke Indonesia.

Survei notifikasi itu, pihaknya menambah instrumen untuk kehati-hatian terhadap produk impor ikan kaleng di kaleng yang masuk ke Indonesia.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

Survei ini dilakukan karena terdapat informasi bahwa pemerintah China dan pemerintah lainnya telah melakukan karantina perikanan impor ikan beku.

CACING DI IKAN KALENG

Produsen Ikan Olahan di Muncar Terpakuk

BANYUWANGI, KOMPAS — Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mengumumkan terdapat cacing dalam ikan kaleng di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

menu malam ini
IKAN KALENG.



Menu Hari Ini, 30 cm x 42 cm

Nuriarta 2018

Hak Politik Sejumlah Koruptor Dicabut

***Pencabutan hak politik umumnya selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana, kecuali Irman Gusman pencabutan hak politiknya selama 3 tahun.**

Luthfi Hasan Ishaq (Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera)

Atut Chosiyah (Bekas Gubernur Banten)

Setya Novanto (Bekas Ketua DPR)

Anas Urbaningrum (Bekas Ketua Umum Partai Demokrat)

Nur Alam (Bekas Gubernur Sulawesi Tenggara)

Akil Mochtar (Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi)

Andi Taufan Tiro (Bekas anggota Komisi V DPR)

Suryadharma Ali (Bekas Menteri Agama)

Irman Gusman (Bekas Ketua DPD)*

I Putu Sudiartana (Bekas anggota Komisi III DPR)

Yan Anton Ferdian (Bekas Bupati Banyuwangi, Sumsei)

Sumber: Litbang Kompas/XNA, Disarikan dari Pemberitaan Kompas

INFOGRAFIK: DIMAS

Katakan TIDAK pada Korupsi (?)

nuriarta'2018

Apa Kabar, 30 cm x 42 cm

PEMBERANTASAN KORUPSI

Saat Gubernur Punya Tiga KTP



nuriarta '2018

Eee KTP, 30 cm x 42 cm

JEJAK BANCAKAN PROYEK E-KTP

Duit proyek e-KTP diduga mengalir ke semua ketua fraksi di Senayan. Harus dibongkar tuntas.

KOMISI Pemberantasan Korupsi harus semaksimal mungkin mengaudit pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Indikasi bahwa proyek ini menjadi bancakan para pejabat, pengusaha, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat makin kentara. Di kalangan politikus, bukan hanya mantan Ketua DPR Setya Novanto yang terlibat.

Bekas Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, telah membebankan pembagian duit dari proyek senilai Rp 5,84 triliun itu saat bersaksi pada sidang perkara Setya pekan lalu. Ia mengungkapkan semua ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 mendapat jatah. Pengakuan Nazar makin mengkonfirmasi bahwa anggaran

proyek ini telah diutang banyak pihak. Kerugian negara akibat korupsi e-KTP diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

Pelaksanaan proyek yang dimulai pada 2011 itu benar-benar amburadul. Bao korupsi pun belakangan terucum. Pejabat dan pengusaha yang mengelola langsung pengadaan e-KTP telah divonis bersalah. Setya Novanto, yang sebelumnya tampak lihai menghindari jerat hukum, pun akhirnya diadili. Ia dituntut beres-bes dalam menggiring proyek itu saat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Hanya, komisi antikorupsi masih harus membongkar lebih jauh. Jaksa KPK perlu menghadirkan semua ketua fraksi yang dituntut Nazaruddin. Di antara deretan ketua fraksi itu ada yang



kini menduduki jabatan penting. Tjahjo Kumolo, yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, adalah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat proyek e-KTP bergulir. Ia menduduki posisi ini pada 2009-2012 dan kemudian digantikan Puan Maharani—kini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sudah ada petunjuk yang membuktikan Nazaruddin tidak asal tuduh. Bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Habsah, telah mengaku menerima uang Rp 1 miliar dari proyek e-KTP lewat Nazaruddin. Ia kemudian mengutarakan duit itu untuk kegiatan operasional fraksinya. Setelah korupsi proyek e-KTP terbongkar, Jafar mengembalikan uang ke KPK pada tahun lalu.

Pengusutan pelaku lain korupsi e-KTP amat mendesak demi memenuhi aspek keadilan dalam penegakan hukum. Kendati peran Setya Novanto amat besar dalam skandal itu, ia tidak mungkin bisa dianggap melupakan koleganya di Senayan. Para pejabat yang memegang peranan penting dalam urusan ini selain Setya Novanto adalah mantan Ketua Badan Anggaran di DPR.

Penyidik KPK tak harus menjerat politikus Senayan dengan pasal suap, yang memerlukan pembuktian lebih sulit. Mereka bisa dijaring dengan tuduhan menyalahgunakan kekuasaan suap, seperti halnya Setya Novanto. Politikus Golkar ini diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Setya juga dianggap menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain.

Adanya kemungkinan duit proyek e-KTP mengalir ke partai politik pun perlu ditelusuri. Pengakuan Jafar memperlihatkan uang dari proyek ini bukan untuk kegiatan umum partai. Komisi antikorupsi bisa melacak kemungkinan korupsi di kalangan politikus sejumlah partai politik. Nazaruddin bisa dituntut mengembalikan hal ini. Setya Novanto pun tentu harus dituntut mengembalikan hal ini.

KPK perlu menjerat siapa pun yang terlibat dalam proyek e-KTP dengan menjerat siapa pun yang terlibat dalam anggaran proyek yang amat berguna bagi masyarakat. Para pejabat yang terlibat dalam proyek ini harus dituntut mengembalikan uang yang mereka peroleh dari proyek ini kepada Badan Anggaran di DPR.

26 | TEMPO | 4 MARET 2018



pesta Para
PENCURI,..

nuriarta '2018

Pesta Para Pencuri, 30 cm x 42 cm

Kedepankan Rasionalitas

Berita bohong di media sosial harus diwaspadai karena dapat berdampak negatif. Untuk itu, rasionalitas harus diutamakan dalam menyikapi informasi.

**hati-hati
HOAKS
nang.....**

Idealisme Tangkal Hoaks

Masyarakat harus cerdas ketika menerima informasi. Jika menemukan informasi yang salah dari sebuah media, masyarakat diminta bersikap kritis dan melaporkan ke media tersebut.



nuriarta '2018

Hati-Hati Hoaks, 30 cm x 42 cm



Presiden Ingin Polri Tuntaskan Isu Hoaks



...hoaks dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, kasus hoaks harus segera dituntaskan.

...- Langkah pertama terhadap permasalahan tersebut adalah pembongkaran atau pembungkaran. Kebencian harus dihilangkan. Kepolisian harus tegas. Kepolisian diminta menuntaskan kasus ini. Jokowi Widodo geram hoaks yang membuat saya sakit. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, J. Prasetyo, Partai

...wa banyak berita tak masuk akal tetapi tetap diproduksi dengan terencana. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, J. Prasetyo, Partai



...isu (Hoaks) itu (bisa terjadi) apabila sudah perintahkan supaya para ulama termakan kabar hoaks disampaikan Presiden Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pvd) Tito Karnavian. "Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin setiap eras bulan dan diikuti oleh jajar dari TNI dan Polri. Apabila dan Polri solid, NKRI akan jadi tutur Hadi.

...put diselesaikan dan hukum di atas segalanya." ujar Safarudin. **Kebersamaan** Dalam upaya meningkatkan soliditas aparat negara, TNI dan Polri berkolaborasi bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dipimpin oleh Panglima TNI Mareskwal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pvd) Tito Karnavian. "Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin setiap eras bulan dan diikuti oleh jajar dari TNI dan Polri. Apabila dan Polri solid, NKRI akan jadi tutur Hadi. Menurut Tito, kerja sama yang solid penting dalam mengemban tugas negara. "Soliditas ini akan terus dijaga, baik secara formal maupun informal, antara pimpinan dan anggota di semua tingkat," katanya. (INA/DM07)

nuriarta 2018

Hoax, 30 cm x 42 cm

Partai Demokrat Siapkan Kejutan

Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat yang akan dibuka Presiden Joko Widodo disebutkan akan ada kejutan. Seperti apa kejutannya nanti?

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat mempersiapkan kegiatan pada Rapat Pimpinan Nasional (RapiNAS) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu hingga Minggu besok. Tak hanya mengemukakan kegiatan itu terkait dengan keputusannya Demokrat untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, RapiNAS partai akan dihadiri 1000 kader Demokrat secara nasional. Dibuka Presiden Joko Widodo.

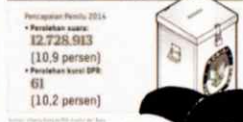
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Abdi Anwarul di Jakarta, Jumat (9/3), mengatakan, upacara adalah kegiatan seremonial sebagai perwujudan komitmen politik organisasi pada Pemilu 2019. Itu termasuk melibatkan anak Demokrat untuk Pemilu 2019. Ditanya soal apakah ada kekhawatiran anak-anak Demokrat dan dikawatirkan saat pemilihan, Nurhayati menambahkan, "Anak-anak itu akan mau ikut kegiatan, bukan" katanya.

Momok dia tidak khawatir kemungkinan Demokrat terganggu kegiatan keputusannya. Namun, hal itu tergantung dari apa yang kader Demokrat. "Jika kader atau anak-anak Demokrat yang merasa ada kekhawatiran, itu ya tidak yang akan diwujudkan," ujarnya.

Sebelum itu, pengantar internal partai bergeser. Ada yang ingin Demokrat siap dengan lima partai politik yang mengungguli Jokowi sebagai capres pada 2019, ada juga yang ingin mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di luar itu, ada pemilih yang merasa partai politik adalah alternatif suara capres di luar Jokowi dan Prabowo.

Partai Demokrat

• Ketua Umum: Nurhayati Abdi Anwarul
 • Sekretaris Jenderal: Nurhayati Abdi Anwarul



Survei politik menunjukkan bahwa partai politik yang mengungguli Jokowi sebagai capres pada 2019, ada juga yang ingin mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di luar itu, ada pemilih yang merasa partai politik adalah alternatif suara capres di luar Jokowi dan Prabowo.

Survei politik menunjukkan bahwa partai politik yang mengungguli Jokowi sebagai capres pada 2019, ada juga yang ingin mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di luar itu, ada pemilih yang merasa partai politik adalah alternatif suara capres di luar Jokowi dan Prabowo.

Ketua Demokrat di Jakarta, seperti akan hadir pada rapat-rapat serta pertemuan. Agar dan Jokowi bisa bertemu.

Poros kaulah baru

Namun, Sekjen Partai Demokrat Nurhayati Abdi Anwarul mengatakan, pihaknya akan membuka diri untuk menerima semua calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat. Namun, dia menambahkan, pihaknya akan tetap mempertahankan Jokowi sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Survei politik menunjukkan bahwa partai politik yang mengungguli Jokowi sebagai capres pada 2019, ada juga yang ingin mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di luar itu, ada pemilih yang merasa partai politik adalah alternatif suara capres di luar Jokowi dan Prabowo.

Survei politik menunjukkan bahwa partai politik yang mengungguli Jokowi sebagai capres pada 2019, ada juga yang ingin mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di luar itu, ada pemilih yang merasa partai politik adalah alternatif suara capres di luar Jokowi dan Prabowo.

jadi degdegan apa ya???

diberi cincin?

Presiden Joko Widodo me...
 yang muncul dalam Pemilihan Presiden...
 Namun, belum muncul por...
 Prabowo... 2019, diduga sul...

TANGERANG – Presiden Joko Widodo akan membuka Rapat Pimpinan Nasional (RapiNAS) Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Sabtu hingga Minggu besok. Tak hanya mengemukakan kegiatan itu terkait dengan keputusannya Demokrat untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, RapiNAS partai akan dihadiri 1000 kader Demokrat secara nasional. Dibuka Presiden Joko Widodo.



kue?

.....

poros baru?

Nuriarta 2018

Deg-Degan, 30 cm x 42 cm

TAJUK RENCANA

Pilkada Para Tersangka

Judul tersebut boleh jadi tidak sepenuhnya tepat. Namun, judul itu dipilih untuk menggambarkan kegeraman publik akan situasi kebangsaan kita akhir-akhir ini.

Bagi orang yang pernah, judul itu tentu bisa dimengerti. Peran penting dari semua peserta Pilkada yang diterbitkan sebagai terungkap kasus korupsi, gratifikasi, atau suap. Pilkada serentak digelar di 172 wilayah. Dari sini pemerintahan mungkin kecil. Akan tetapi, fakta itu paling tidak menggambarkan ada yang tidak dalam proses pemerintahan politik. Ada indikator lain di belakang kata nilai dan moralitas bangsa ini.

11 Maret 2008, KPK mengemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Machmud Arifin maju lagi sebagai wakil rakyat di Kota Malara. Arifin pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malara periode 2004-2008.

Sebelumnya, Arifin berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dwi Padi. Arifin adalah anak Adhianto, Wakil Bupati sebagai Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.

Arifin adalah Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.

Arifin adalah Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.

Arifin adalah Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.

Arifin adalah Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.

Arifin adalah Wakil Bupati Kendari, Sulawesi Tenggara. Arifin masuk KPK sebagai Kewasusutan.



KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Novanto Menyebut Sejumlah Nama Baru

Kapan ya..... INDONESIA bisa bebas koruptor??

...hemmmm... mungkin tahun 2030 Nang,.....

PAS — Terdakwa Novanto, terdakwa proyek pengadaan penduduk elektronik, menyebutkan sejumlah nama yang dituding dari proyek tersebut.

Pengadilan Tinggi Jakarta, Novanto tetap menerima uang.

Dua nama baru Novanto adalah dinator Bidan Manusia dan Maharani serta Kabinet Pramono.

Menurut Novanto dan Pramono di rumah Made Oka Masagun.

Menurut Novanto dan Pramono di rumah Made Oka Masagun.

Menurut Novanto dan Pramono di rumah Made Oka Masagun.

Menurut Novanto dan Pramono di rumah Made Oka Masagun.



Membantah

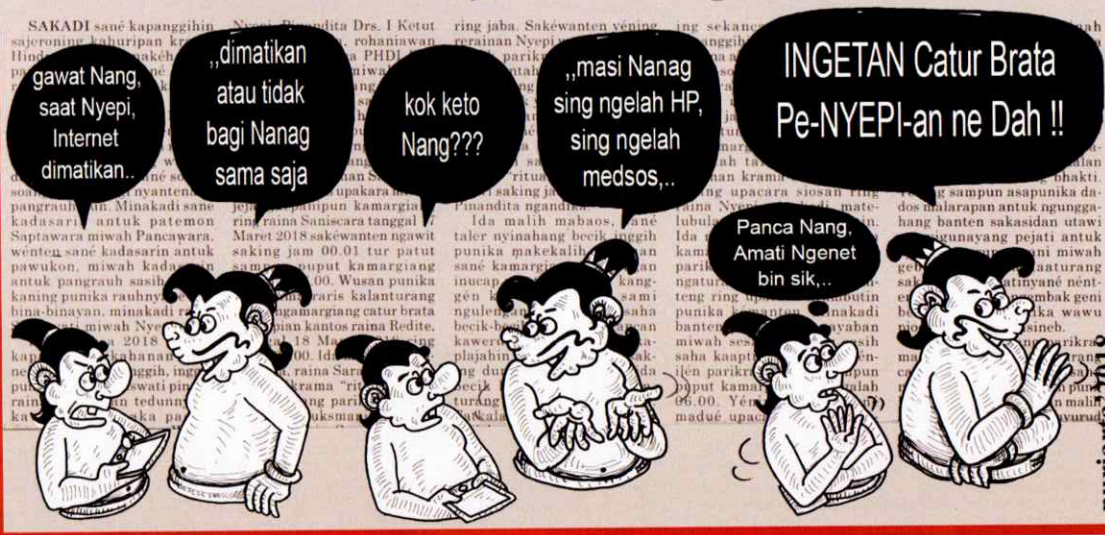
Secara terpisah, nama-nama yang disebut Novanto telah me-

nuriarta '2018

Bebas Korupsi?, 30 cm x 42 cm

Patemon Raina Saraswati sareng Nyepi

Parikrama Yadnya Saking Jaba ka Jero



Catur Brata, 30 cm x 42 cm



Sama-Sama Kuat, 30 cm x 42 cm



KOMPAS, SELASA, 13 MARET 2018

KPK Tangkap Hakim dan Staf PN Tangerang

Seorang hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ditangkap KPK atas dugaan suap

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

Seorang hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ditangkap KPK atas dugaan suap.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

KPK menangkap hakim dan panitera pengganti pengadilan negeri Tangerang, Selasa (13/3), atas dugaan suap dalam perkara perdata.

hakim dan sebetulnya panitera pengganti yang telah diproses hukum oleh KPK sejak beberapa hari berlatar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bicara Jaksa Agung CMAJ Subandi menegaskan dengan penemuan yang sudah cukup "Korupsi sudah diidentifikasi, tapi belum ditindaklanjuti". Yang berarti, hakim dan panitera pengganti tidak punya masalah hukum secara hukum.

Lebih lanjut, Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.

Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.

Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.

Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.

menyebut panitera pengganti pada PN Jakarta Selatan. Ia terbukti mencajarkan remunerasi hakim atas pertimbangan pengacara PT Agensi Maritim, Ekstrada, Aklatrad Zairi, yang telah menandatangani.

Potensi yang dilakukan melalui hakim yang diproses di Mahkamah Agung, yang telah terbukti dibayar-bayar dengan jumlah-jumlah, yaitu 6 tahun pengacara dengan standar Rp 250 juta setahun di bagian hukum.

Terdapat dugaan KPK, secara umum Zairi pada 23 Agustus 2017 di PN Jakarta, kemudian ditangkap karena Zairi menandatangani dokumen yang bernilai Rp 400 juta yang telah bisa ditunjukkan oleh Terzisti. Subandi mengatakan, Zairi sudah menandatangani surat bernilai Terzisti sebesar Rp 25 juta.

Usung koruptif diproses karena agar Terzisti menandatangani dokumen yang bernilai Rp 400 juta yang telah bisa ditunjukkan oleh Terzisti. Subandi mengatakan, Zairi sudah menandatangani surat bernilai Terzisti sebesar Rp 25 juta.

Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.

Subandi mengatakan, penemuan ini berkaitan dengan dugaan suap yang sudah dilakukan beberapa kali.



Suap, 30 cm x 42 cm

Muriarta 2018

PIMPINAN MPR

Wakil Rakyat Makin Berjarak dari Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dilantik di tengah kritiknya dari publik dan adanya keberatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pengalihan kritik dari publik dalam persoaian ini memunculkan penilaian bahwa lembaga representasi rakyat tersebut kian berjarak dari rakyatnya.

Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Ahmad Muani dari Fraksi Partai Gerindra, dan Muhsinin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (26/7), dilantik menjadi Wakil Ketua MPR dalam Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Zulkaffi Hasan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pelantikan itu dibarengi oleh sembilan dari sepuluh fraksi partai politik, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam acara itu karena menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memuat penambahan tiga jenis peminan baru MPR.

"Perubahan itu akan merugikan MPR ini di tengah situasi berbagai hal yang dihadapi bangsa ini," kata Ahmad Basarah dalam pernyataan tertulisnya. "Membuat perubahan ini sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada."

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Koordinator Forum Komunikasi Indonesia (Gormapi) Sebastian Satrio mengatakan, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

PIMPINAN MPR

Kursi Tambahan untuk Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat diragukan bisa meningkatkan keefektifan dan kinerja MPR. Penambahan itu pun dinilai tidak berdampak signifikan. Bahkan, kehadiran mereka justru merugikan rakyat.

Yakni Ahmad Basarah dari Fraksi Perjuangan, Ahmad Muani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Muhsinin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (26/7), dilantik menjadi Wakil Ketua MPR dalam Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Zulkaffi Hasan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pelantikan itu dibarengi oleh sembilan dari sepuluh fraksi partai politik, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam acara itu karena menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memuat penambahan tiga jenis peminan baru MPR.

"Perubahan itu akan merugikan MPR ini di tengah situasi berbagai hal yang dihadapi bangsa ini," kata Ahmad Basarah dalam pernyataan tertulisnya. "Membuat perubahan ini sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada."

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Koordinator Forum Komunikasi Indonesia (Gormapi) Sebastian Satrio mengatakan, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

PIMPINAN MPR

Wakil Rakyat Makin Berjarak dari Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dilantik di tengah kritiknya dari publik dan adanya keberatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pengalihan kritik dari publik dalam persoaian ini memunculkan penilaian bahwa lembaga representasi rakyat tersebut kian berjarak dari rakyatnya.

Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Ahmad Muani dari Fraksi Partai Gerindra, dan Muhsinin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (26/7), dilantik menjadi Wakil Ketua MPR dalam Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Zulkaffi Hasan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pelantikan itu dibarengi oleh sembilan dari sepuluh fraksi partai politik, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam acara itu karena menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memuat penambahan tiga jenis peminan baru MPR.

"Perubahan itu akan merugikan MPR ini di tengah situasi berbagai hal yang dihadapi bangsa ini," kata Ahmad Basarah dalam pernyataan tertulisnya. "Membuat perubahan ini sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada."

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Koordinator Forum Komunikasi Indonesia (Gormapi) Sebastian Satrio mengatakan, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.

Menurut Ahmad Basarah, perubahan ini akan merugikan sebagai dasar memajukan kursi wakil ketua. Peristiwa ini yang rendah terhadap lembaga keparlemen yang sudah ada.



Dengar Suara Kami, 30 cm x 42

Pendidikan Belum Optimal

UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen sebagai momentum mewujudkan profesionalisme guru. Namun, hal itu masih perlu dibarengi dengan pendidikan secara menyeluruh

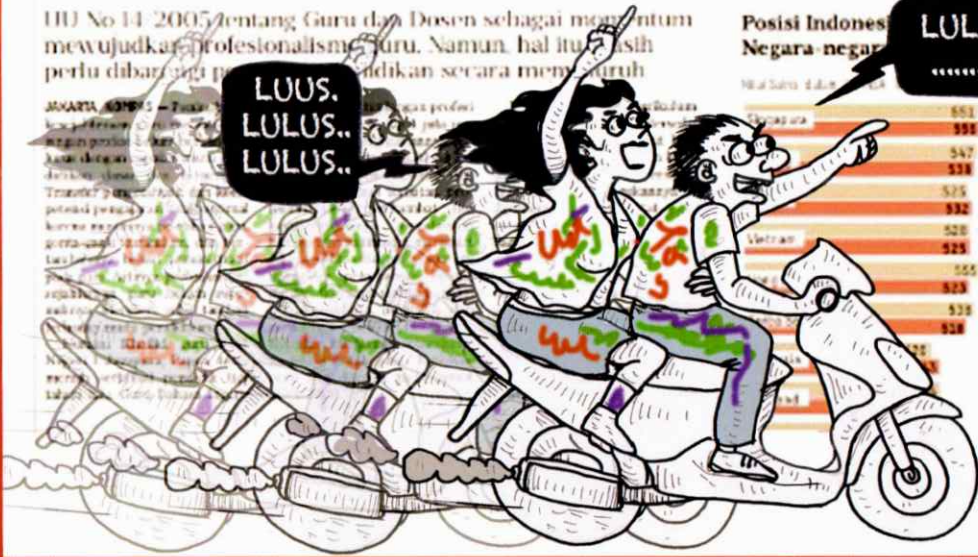
JAKARTA, 10 SEPTEMBER — Peningkatan profesionalisme guru sebagai momentum mewujudkan profesionalisme guru. Namun, hal itu masih perlu dibarengi dengan pendidikan secara menyeluruh

LUUS.
LULUS..
LULUS..

Posisi Indonesia
Negara-negara
LULUS

Negara	Nilai
Indonesia	551
Thailand	550
Malaysia	547
Singapura	538
Brunei	525
Arab Saudi	532
Yunani	520
Vietnam	529
India	555
China	523
Rusia	528
USA	528

USA (Program for International Student Assessment) merupakan tes standar internasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tes ini terdiri dari 3 bagian yaitu: membaca, matematika, dan sains. Hasil tes ini akan menentukan skor siswa yang akan menentukan peringkat siswa yang akan diterima di perguruan tinggi.



nuriarta 2018

Lulus, 30 cm x 42 cm



Bersatu Untuk Indonesia, 30 cm x 42 cm

Poros Ketiga Berpeluang Muncul

Hingga saat ini belum ada sosok yang elektabilitasnya mendekati Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun, Pemilu 2019 tetap terbuka kemungkinan diikuti tiga pasangan calon.



Suara terpendak, Wakil Sekre... dengan partai lain. "Rami mas... ketanya. (1/3/19)

Poros Ketiga Berpeluang Muncul

...Pilih Partai PHP, nomor O,...

...coblos Paket MERTUA



Suara terpendak, Wakil Sekre... dengan partai lain. "Rami mas... ketanya. (1/3/19)

Hingga saat ini belum ada sosok yang elektabilitasnya mendekati Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun, Pemilu 2019 tetap terbuka kemungkinan diikuti tiga pasangan calon.

JAKARTA, KOMPAS — Meski kini jeda politik cenderung memanas, jeda pemilu pembuktian oleh partai politik. Pemilihan Presiden 2019 masih berpotensi diikuti tiga pasangan calon. Tiga partai yang belum mencairkan arsh kandidat yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga partai ini partai yang kini pemilih di DPR, lima di antaranya sudah kembali mencairkan calon Joko Widodo di Pemilu 2019. Lima partai itu adalah PKB, PPS, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Garuda akan mencairkan kandidat Ridwan Djalil, Partai Amanat Nasional akan mencairkan kandidat Gusman Gusman, Partai Kebangkitan Bangsa akan mencairkan kandidat Hidayatulloh. Partai Amanat Nasional akan mencairkan kandidat Hidayatulloh. Partai Kebangkitan Bangsa akan mencairkan kandidat Hidayatulloh. Partai Amanat Nasional akan mencairkan kandidat Hidayatulloh. Partai Kebangkitan Bangsa akan mencairkan kandidat Hidayatulloh.

18
Marta 2018



Bahe-NOL, 30 cm x 42 cm

Kedepankan Etika dalam Berpolitik

Jelang Pemilu 2019, banyak orang yang ingin menang. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah dua nama yang paling banyak disebut. Hal ini menunjukkan bahwa politik memang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Mengetahui cara tidak bertingkah laku dalam berpolitik adalah hal yang penting. Cara tidak bertingkah laku dalam berpolitik adalah dengan memperhatikan etika politik. Etika politik adalah perilaku yang menunjukkan sikap dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang politikus. Etika politik yang baik akan membuat seorang politikus lebih dipercaya oleh masyarakat. Etika politik yang baik juga akan membuat seorang politikus lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Etika politik yang baik adalah kunci keberhasilan dalam berpolitik.

TAK ADA BENAR SALAH YANG ADA ADALAH KALAH MENANG !!



NURIARTA

Etikanya mana?, 21 cm x 24 cm

Pemilih Bimbang Jadi Sasaran

BIMBANG MEMILIH CAPRES YA?????

KUOTA HABIS BLI.....

Pemilih bimbang dan yang masih bisa berubah pilihan jadi sasaran kampanye. Mereka bisa jadi penentu kemenangan.

JAKARTA, KOMPAS – Pemilih bimbang dan pemilih yang masih memungkinkan untuk mengubah pilihannya menjadi sasaran utama kampanye para kandidat peserta Pemilihan Presiden 2019. Hal tersebut oleh situs kandidat dan secara umum akan lebih sering hingga pemerintahan mulai 17 April 2019 akan menunjukkan siapa yang dapat lebih banyak support terhadap pemilih bimbang.

Menurut hasil survei Litbang Kompas, ada 302 persen dari calon pemilih. Jokowi-Maruf yang masih berpengaruh untuk mengubah pilihannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sementara ada 22,7 persen pemilih Pilpres bimbang yang masih mungkin mengubah pilihan mereka. Adapun calon pemilih yang masih bimbang akan belum menentukan pilihannya berdasarkan hasil survei yang dilakukan 24 September-1 Oktober 2018 itu sebanyak 14,7 persen (Kompas, 24/9/2018).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Joko Widodo-Kesri dari Partai Pergerakan Pembangunan Ahmad Suni, Ketua KPU, di Jakarta, menambahkan, untuk menarik pemilih Pilpres. Sehingga yang masih mungkin berubah sikap atau pemilih bimbang kampanye akan menunjukkan pendekatan langsung ke masyarakat.

Tim Jokowi-Maruf lebih memperhatikan dari para kandidat wakil presiden yang mendukung Jokowi-Maruf. Salah satunya, yaitu memusatkan pada pemilih bimbang yang di daerahnya merupakan mayoritas. Hal ini juga yang dilakukan Jokowi-Maruf.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga memusatkan perhatian ke calon pemilih bimbang. Di PAN, akan dicari strategi untuk menarik pemilih bimbang yang akan terus berinteraksi dengan masyarakat.

Hal tersebut juga menjadi fokus dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haryono, yang akan lebih berfokus ke pemilih bimbang. Hal ini juga yang dilakukan Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-Maruf.



NURIARTA

Bimbang, 24 cm x 36 cm

Tolak Adu Domba

Pimpinan ormas Islam
Pembakaran bendera d

**POKOKNYA KITA
JANGAN MAU DIADU
BRO.....**

Indonesia tetap bersatu.
di oleh Polri

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mengajak umat Islam menyerahkan penanganan kasus pembakaran bendera organisasi kemasyarakatan terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia, kepada polisi. Mereka juga

ruh
k
ca
di
lan
(26/10
Dalu
lana 3,5
kitar pukul 23.00. Wapres di-
dampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pang-

lima
jant
(Pol
pimp
antaranya Ketua Umum Pimp
an P
H
sampaikan
Islam meng
Indonesia sel
syawahar menyelesaikan
ngan tetap me
Pimp
esalkan per
bendera saat
ari Santri Nasio
an Limbangan, Ka
ut, Jawa Barat, 22
dan sepakat untuk
situasi agar tidak berke
g ke arah yang tidak diingin
an. Oknum pembakar bendera
dan pembawanya juga telah me-
minta maaf. Pimpinan GP Ansa
dan PBNU menyesalkan kejadian
tersebut dan telah memberikan
sanksi.

Dalam pernyataan bersama

lim
jant
(Pol
pimp
antaranya Ketua Umum Pimp
an P
H
sampaikan
Islam meng
Indonesia sel
syawahar menyelesaikan
ngan tetap me
Pimp
esalkan per
bendera saat
ari Santri Nasio
an Limbangan, Ka
ut, Jawa Barat, 22
dan sepakat untuk
situasi agar tidak berke
g ke arah yang tidak diingin
an. Oknum pembakar bendera
dan pembawanya juga telah me-
minta maaf. Pimpinan GP Ansa
dan PBNU menyesalkan kejadian
tersebut dan telah memberikan
sanksi.

ruh
k
ca
di
lan
(26/10
Dalu
lana 3,5
kitar pukul 23.00. Wapres di-
dampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pang-

lima
jant
(Pol
pimp
antaranya Ketua Umum Pimp
an P
H
sampaikan
Islam meng
Indonesia sel
syawahar menyelesaikan
ngan tetap me
Pimp
esalkan per
bendera saat
ari Santri Nasio
an Limbangan, Ka
ut, Jawa Barat, 22
dan sepakat untuk
situasi agar tidak berke
g ke arah yang tidak diingin
an. Oknum pembakar bendera
dan pembawanya juga telah me-
minta maaf. Pimpinan GP Ansa
dan PBNU menyesalkan kejadian
tersebut dan telah memberikan
sanksi.

Dalam pernyataan bersama

lima
jant
(Pol
pimp
antaranya Ketua Umum Pimp
an P
H
sampaikan
Islam meng
Indonesia sel
syawahar menyelesaikan
ngan tetap me
Pimp
esalkan per
bendera saat
ari Santri Nasio
an Limbangan, Ka
ut, Jawa Barat, 22
dan sepakat untuk
situasi agar tidak berke
g ke arah yang tidak diingin
an. Oknum pembakar bendera
dan pembawanya juga telah me-
minta maaf. Pimpinan GP Ansa
dan PBNU menyesalkan kejadian
tersebut dan telah memberikan
sanksi.

ruh
k
ca
di
lan
(26/10
Dalu
lana 3,5
kitar pukul 23.00. Wapres di-
dampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pang-

lima
jant
(Pol
pimp
antaranya Ketua Umum Pimp
an P
H
sampaikan
Islam meng
Indonesia sel
syawahar menyelesaikan
ngan tetap me
Pimp
esalkan per
bendera saat
ari Santri Nasio
an Limbangan, Ka
ut, Jawa Barat, 22
dan sepakat untuk
situasi agar tidak berke
g ke arah yang tidak diingin
an. Oknum pembakar bendera
dan pembawanya juga telah me-
minta maaf. Pimpinan GP Ansa
dan PBNU menyesalkan kejadian
tersebut dan telah memberikan
sanksi.

Dalam pernyataan bersama



Adu Domba, 21 cm x 24 cm

Dosen Terbelenggu Administrasi

Laporan penelitian yang harus diisi lebih banyak hal teknis, misalnya surat izin dari pejabat terkait serta laporan biaya transportasi, penginapan, dan konsumsi



Administrasi, 21 cm x 24 cm

Kesalahan Manajemen Mulai Disoroti

Tidak pernah ada faktor tunggal dalam kecelakaan pesawat udara. Dalam analisis kasus pesawat jatuh akan diungkap dalam tiga kategori, yaitu cuaca, kesalahan penanganan keprawatan, dan kesalahan sistem.



BERENJAN DI
SPEK...
Sarana Pengaduan 112

.....Cukup
KOTAK HITAM SAJA,,
JANGAN CARI SAYA.
PLEASE.....



NURIARTA

Kambing Hitam, 24 cm x 36 cm



Sopan Santun, 25 cm x 40 cm

Aksi Cegah Korupsi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi: Namun, implementasinya bergantung pada pir...

JAKARTA, KOMPAS — Peralihan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat menjadi sarana membangun sistem pemerintahan suap dan gratifikasi di tingkat pusat dan daerah. Ada 11 rencana aksi dari sektor keuangan negara, perzinahan dan tata niaga, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang bisa segera dijalankan untuk mencegah korupsi.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggala, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2018), mengatakan, 11 rencana aksi diturunkan dalam 26 sub-aksi. "Dari 26 sub-aksi, sudah ditentukan lembaga mana yang akan bertanggung jawab. Rencana aksi ini dituangkan dalam SKB (surat keputusan bersama) lima kepala lembaga, yakni KPK, KSP, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Penda-

yaganaan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi," katanya.

Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sorotan setelah KPK mempublikasikan Penilaian Integritas terhadap 36 kementerian dan pemerintah provinsi pada 0-100. "Kami memiliki 100 kriteria yang di atas statusnya," kata Nainggala. Soalnya dengan korupsi dan nepotisme (KKN).

Sistem yang ada saat ini suap dan gratifikasi. "Sistem yang ada itu akan berjalan dan sistem yang baru akan berjalan," kata Nainggala. "Sistem yang ada itu akan berjalan dan sistem yang baru akan berjalan," kata Nainggala.

Partai politik juga dikejar untuk memperbaiki sistem integritas mengingat 61,17 persen pelat-

SAYA BERSIH



Namun, implementasinya bergantung pada pir...

proses dalam kasus korupsi berdimensi politik, antara lain 69 anggota DPRD, 149 anggota DPRD, dan 223 orang yang terkait dalam proses seleksi. Di sisi lain, kecurangan dalam pemilihan umum semakin mengancam stabilitas pemerintahan.

konferensi nasional tentang kerentanan korupsi. Pemerintah pun tidak tinggal diam terhadap keadaan ini. Pemerintah akan mempersiapkan kerangka sistem nasional untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan pusat ataupun daerah.

Deputi II Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Yanuar Nugroho mengatakan, sistem meritokrasi akan dipertahankan dan dipertajam. "Negara akan dipertajam dan dipertajam," kata Yanuar. "Negara akan dipertajam dan dipertajam," kata Yanuar.

pentingan penentuan seleksi jabatan di pusat dan daerah bisa dikurangi.

SAYA TIDAK PERCAYA



Daerah dengan skor terendah Kota Banda Aceh dan Kota Banda Aceh Amimengemukakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang diduga melakukan pelanggaran. "Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang diduga melakukan pelanggaran," kata Nainggala.

Publik. "Publik," kata Nainggala.

Tak Percaya, 27 cm x 40 cm

KASUS TAUFIK KURNIAWAN

Pimpinan DPR Dinilai Inkonsisten

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR belum menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari partai-partai yang mendukungnya. Ketua DPR menilai inkonsistensi ini bertentangan dengan ketentuan hukum tetap.

Terkait adanya syarat itu, standar ganda atau inkonsistensi DPR dalam memproses surat pengunduran diri Ketua DPR dinilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelanggaran hukum.

Pada 29 Oktober lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Golkar.

Namun, surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

KASUS TAUFIK KURNIAWAN

Pimpinan DPR Dinilai Inkonsisten

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR belum menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari partai-partai yang mendukungnya. Ketua DPR menilai inkonsistensi ini bertentangan dengan ketentuan hukum tetap.

Terkait adanya syarat itu, standar ganda atau inkonsistensi DPR dalam memproses surat pengunduran diri Ketua DPR dinilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelanggaran hukum.

Pada 29 Oktober lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Golkar.

Namun, surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

KASUS TAUFIK KURNIAWAN

Pimpinan DPR Dinilai Inkonsisten

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR belum menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari partai-partai yang mendukungnya. Ketua DPR menilai inkonsistensi ini bertentangan dengan ketentuan hukum tetap.

Terkait adanya syarat itu, standar ganda atau inkonsistensi DPR dalam memproses surat pengunduran diri Ketua DPR dinilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelanggaran hukum.

Pada 29 Oktober lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat pengunduran diri Ketua DPR Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Golkar.

Namun, surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

Surat pengunduran diri itu masih belum diterima DPR. Ketua DPR menilai, menanggapi surat pengunduran diri itu, DPR harus konsisten.

NANANG PALING KONSISTEN

KONSISTEN UNTUK TIDAK KONSISTEN



Dalam pasal itu jelas diatur bahwa pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan jika diusulkan partai politiknya.

Konsisten, 30 cm x 40 cm

LINGKUNGAN HIDUP

Penyu dan Sampah Mengapung di Laut

JAKARTA, KOMPAS — Hanyutan seekor penyu terancam mengapung di laut dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (27/11/2018). Hewan dilindungi pengumpul makanan buan yang berada di antara sampah itu. Limbah plastik atau polikarbonat mengapung pada permukaan di sekitar binatang punya.

"Seandainya penyu memakan sampah Pulau Pari bisa rusak. Banyak ikan-ikan yang akan mati," kata Ketua KKP 001 RIR.

LINGKUNGAN HIDUP

Penyu dan Sampah Mengapung di Laut

JAKARTA, KOMPAS — Hanyutan seekor penyu terancam mengapung di laut dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (27/11/2018). Hewan dilindungi pengumpul makanan buan yang berada di antara sampah itu. Limbah plastik atau polikarbonat mengapung pada permukaan di sekitar binatang punya.

"Seandainya penyu memakan sampah Pulau Pari bisa rusak. Banyak ikan-ikan yang akan mati," kata Ketua KKP 001 RIR.

LINGKUNGAN HIDUP

Penyu dan Sampah Mengapung di Laut

JAKARTA, KOMPAS — Hanyutan seekor penyu terancam mengapung di laut dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (27/11/2018). Hewan dilindungi pengumpul makanan buan yang berada di antara sampah itu. Limbah plastik atau polikarbonat mengapung pada permukaan di sekitar binatang punya.

"Seandainya penyu memakan sampah Pulau Pari bisa rusak. Banyak ikan-ikan yang akan mati," kata Ketua KKP 001 RIR.



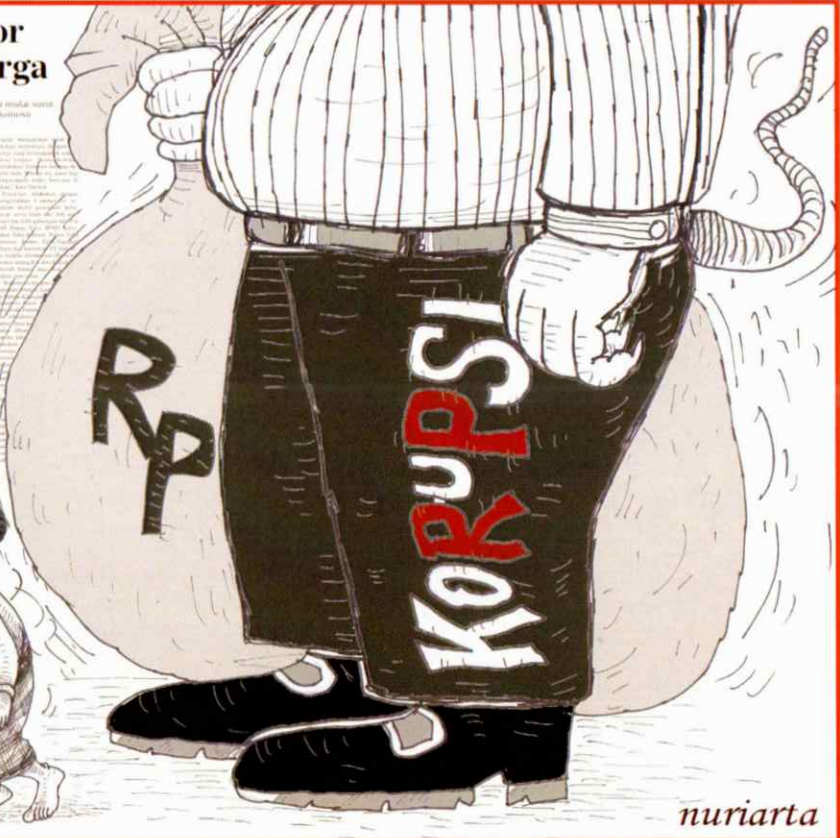
Lagi-Lagi Sampah, 30 cm x 30 cm

Banjir dan Longsor Masih Ancam Warga

Banjir kembali diresakan bangsa. Sementara banjir di Bengkulu mulai surut. Tim NMI gabungan masih terus melakukan bantuan banjir di Bukit Sumbang

YASRI, 20 APRIL - Banjir di kawasan selatan Bengkulu kembali melanda. Banjir di kawasan ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Banyak rumah-rumah yang rusak dan beberapa orang meninggal dunia. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang turun selama beberapa hari terakhir. Banjir ini juga mengakibatkan terputusnya akses jalan-jalan di kawasan tersebut. Tim NMI gabungan masih terus melakukan bantuan banjir di Bukit Sumbang. Mereka telah mendirikan tenda-tenda darurat dan membagikan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak banjir. Mereka juga telah melakukan evakuasi warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Banjir ini juga mengakibatkan terputusnya akses jalan-jalan di kawasan tersebut. Tim NMI gabungan masih terus melakukan bantuan banjir di Bukit Sumbang. Mereka telah mendirikan tenda-tenda darurat dan membagikan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak banjir. Mereka juga telah melakukan evakuasi warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang rawan banjir.

Masih tertunda
Bantuan banjir di kawasan selatan Bengkulu masih tertunda. Tim NMI gabungan masih terus melakukan bantuan banjir di Bukit Sumbang. Mereka telah mendirikan tenda-tenda darurat dan membagikan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak banjir. Mereka juga telah melakukan evakuasi warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang rawan banjir.



nuriarta

Bencana, 30 cm x 40 cm

Langkah Plinplan PSSI

Sikap PSSI dalam menghadapi pemanggilan pemilik akun media sosial...

JAKARTA, KOMPAS — Upaya PSSI melalui Komisi Disiplin untuk memanggil para pemilik atau pengelola akun media sosial guna meminta informasi terkait dengan rencana aksi mereka dalam menghadapi pemanggilan ini mendadak berujung pada eskalasi untuk para pemilik akun media sosial.

Hal ini terungkap melalui diskusi yang digelar di Twitter @pssiindonesia pada Sabtu (30/12/2019) kemarin. Ketua Komisi Disiplin PSSI, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil 25 pemilik akun media sosial yang diduga melanggar peraturan PSSI. "Pemanggilan ini dilakukan agar para pemilik akun media sosial yang melanggar peraturan PSSI dapat diinformasikan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada mereka," kata Agus.

Persatuan
Sepak bola
Seluruh
Indonesia

kirain...
Pengaturan
Skor
Sepak bola
Indonesia



...s. Mereka kini menyatakan pengaturan skor.

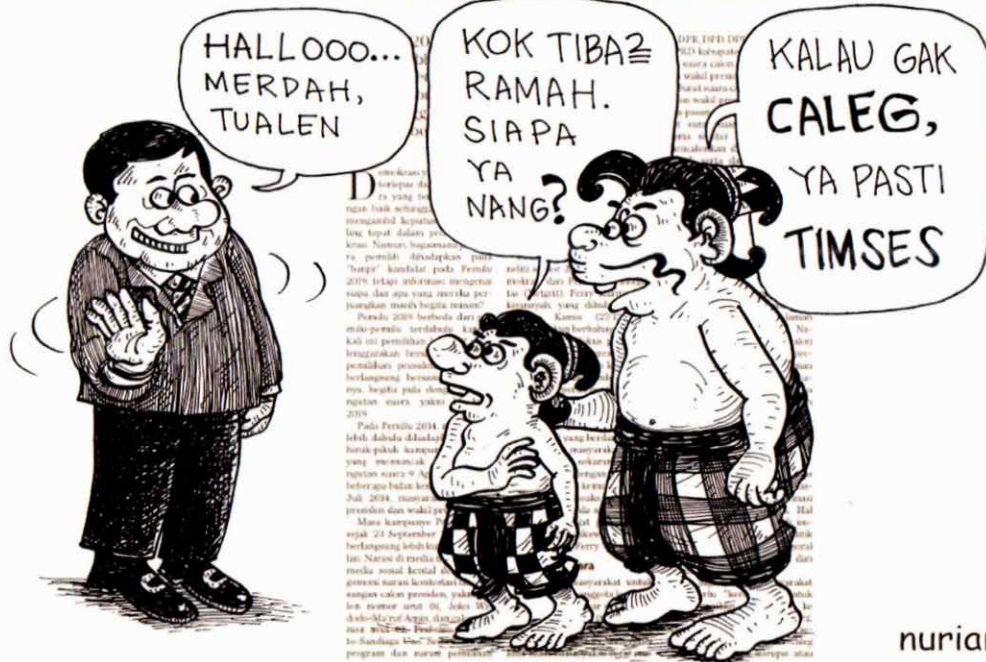
tersebut di pernyataan PSSI Joko Widodo kepada pers. Ketika itu, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti," kata Jokowi.

Dihubungi secara terpisah, peneliti hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eko Supriyanto, menilai, upaya PSSI memanggil pemilik akun media sosial ini tidak akan ada gunanya. Upaya ini hanya membuang-buang waktu tanpa menghasilkan manfaat. Sementara itu Satuan Tugas Antimafia Bola Polri terus mengembangkan penyelidikan ke laga Liga 2 antara PSS Sleman dan Madura FC. (DEN/EO6)

nuriarta

PSSI, 30 cm x 40 cm

Banjir Kandidat dan Minim Informasi



nuriarta

Pasti Caleg, 30 cm x 40 cm



PEMILU 2019

Siapkan Syarat Administrasi Capres

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 sudah akan dibuka pada Sabtu (4/8/2018) hingga 10 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik untuk mempersiapkan berkas administrasi mulai

BERKAS APA ITU PAK?

KPU memahami kemungkinan pendaftaran pasangan cawapres dilakukan pada hari-hari terakhir.

ADMINISTRASI CAWAPRES

...sudah harus diisi. Setiap pengantar yang sudah beres, KPU akan mengadministrasikan dan menyerahkan kepada KPU. Pendaftaran akan dilayani hingga pukul 24.00. Setelah itu, petugas KPU akan memverifikasi berkas calon, sedangkan penetapan dan pengumuman pasangan capres dan cawapres akan dilakukan pada 10 September. Sehari sebelum pendaftaran, nomor urut pendaftaran akan diumumkan di situs KPU. Untuk itu, partai-partai harus mempersiapkan berkas calon presiden dan calon wakil presiden, serta alur pendaftaran. Berkas dari pengalaman pen-



PEMILU 2019

Siapkan Syarat Administrasi Capres

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 sudah akan dibuka pada Sabtu (4/8/2018) hingga 10 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik selain mempersiapkan berkas administrasi juga mulai menyiapkan administrasi calon dan pemenuhan syarat calon.

..EMANG SUDAH DIPILIH?

KPU memahami kemungkinan pendaftaran pasangan capres dan cawapres juga dilakukan pada hari-hari terakhir.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dibuka pada Sabtu (4/8/2018) hingga 10 Agustus mendatang. KPU mengimbau partai-partai selain mempersiapkan berkas administrasi calon dan pemenuhan syarat calon, juga mulai menyiapkan administrasi calon dan pemenuhan syarat calon. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dilayani hingga pukul 24.00. Setelah itu, petugas KPU akan memverifikasi berkas calon, sedangkan penetapan dan pengumuman pasangan capres dan cawapres akan dilakukan pada 10 September. Sehari sebelum pendaftaran, nomor urut pendaftaran akan diumumkan di situs KPU. Untuk itu, partai-partai harus mempersiapkan berkas calon presiden dan calon wakil presiden, serta alur pendaftaran. Berkas dari pengalaman pen-



PEMILU 2019

Siapkan Syarat Administrasi Capres

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 sudah akan dibuka pada Sabtu (4/8/2018) hingga 10 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik agar selain mempersiapkan konsolidasi politik juga mulai mempersiapkan administrasi pencalonan dan pemenuhan syarat calon.

KE-PE-DE-AN

KPU memahami kemungkinan pendaftaran pasangan capres dan cawapres juga dilakukan pada hari-hari terakhir.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dilayani hingga pukul 24.00. Setelah itu, petugas KPU akan memverifikasi berkas calon, sedangkan penetapan dan pengumuman pasangan capres dan cawapres akan dilakukan pada 10 September. Sehari sebelum pendaftaran, nomor urut pendaftaran akan diumumkan di situs KPU. Untuk itu, partai-partai harus mempersiapkan berkas calon presiden dan calon wakil presiden, serta alur pendaftaran. Berkas dari pengalaman pen-



Daftar Cawapres, 30 cm x 42 cm

KARTUN WAJAH

Kartun wajah adalah sebuah gambar kartun yang menghadirkan wajah tokoh. Karya ini sering disebut dengan karikatur karena biasanya hadir untuk menyampaikan kritik. Penulis menempatkan kartun wajah pada persoalan visual terkait dengan distorsi wajah seorang tokoh.

Sibarani dalam buku *Karikatur dan Politik* menyebutnya sebagai personal caricature. Dalam pelukisan penonjolan ciri-ciri dan watak tetap tersirat factor humor. Orang bisa tersenyum saat melihat wajah tokoh yang dikartunkan. Oleh karena itu, kartunis harus memiliki kemampuan untuk mendalami ciri-ciri garis watak dari tokoh yang akan digambarkannya.

Ada hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi “kesalahan” penggambaran kartun wajah. Seperti : menggambarkan tokoh koruptor dengan visual yang karismatik. Kartun wajah

yang dibuat akan mejadi salah total. Ataupun sebaliknya, menggambar wajah tokoh yang dipandang positif oleh dunia, kartunis menggambarinya dengan cara tidaksimpatik, maka akan mengalami kesalahan total yang sama. Gambar kartun wajah harus mampu menyampaikan pesan visualnya. Menggambar tokoh koruptor harus dengan tampilan yang tidak karismatik, dan menggambar tokoh dunia “yang baik” dengan karismatik. Tokoh dunia yang baik maksudnya tokoh yang memiliki citra positif di mata masyarakat.



Mega Korupsi, 30 cm x 42 cm



KONGKALIKONG PROYEK TUGU ANTIKORUPSI

KEJAKSAAN Tinggi Riau pada Rabu pekan lalu mengumumkan penetapan 18 tersangka kasus korupsi Proyek Terbuka Hijau Tugu Inpres Kecamatan Penyidik menyalahgunakan dana Rp 3 miliar dari nilai anggaran sebesar Rp 8 miliar. Pendapatan dan

*Katakan Tidak
pada
KORUPSI*

Asisten Jaksa Agung Tinggi Riau S....., dari hasil penyelidikan korupsi berjemaah itu berawal dari kongkalikong di tingkat kelompok kerja unit layanan pengadaan. "Terjadi rekayasa dan pengaturan proyek

Jangan Korupsi, 30 cm x 42 cm

Tarik menarik Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR)

11 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	12 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	13 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	14 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	15 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	16 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.	17 Januari 2018 Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
--	--	--	--	--	--	--

Golkar Diminta Cepat

Sebelumnya fraksi di DPR meminta Golkar segera merevisikan rumus calon ketua DPR/MPR dan DPR/MPR. Namun, Golkar ingin agar revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan lebih dahulu.

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Partai Golkar untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, DPD, dan DPRD (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Wiranto mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) harus selesai pada 17 Januari 2018. Hal ini karena pada tanggal tersebut akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif tingkat kabupaten/kota.

Wiranto mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang KPU, DPR, DPD, dan DPRD (DPR) harus selesai pada 17 Januari 2018. Hal ini karena pada tanggal tersebut akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif tingkat kabupaten/kota.



Lebih Cepat
Lebih Baik



Lebih Cepat, Lebih Baik, 30 cm x 42 cm

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pendidikan vokasi di Indonesia harus mengutamakan pendidikan karakter dalam proses belajar-mengajar. Dengan menitikberatkan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama, lembaga pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang terampil sekaligus beretos kerja tinggi.

Demikian terungkap dalam sebuah buku, *Romo Casutt 57 Tahun: Sebuah Perjalanan Hidup dan Pemikiran*, yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI) dan Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI) di Jakarta. Penulis buku tersebut adalah kelompok amatir pendidikan, Dono, Teguh, dan Agus. Buku ini berisi tentang perjalanan hidup dan pemikiran Dono, Teguh, dan Agus. Buku ini berisi tentang perjalanan hidup dan pemikiran Dono, Teguh, dan Agus.

Semua aturan itu bertujuan menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki keterampilan dan siap kerja.

proses pendidikan Dono-dono, bila ada yang terlambat melangkah, mereka sudah praktik ke situ-situ atau ke lain-lain. Jadi, masalah di sini, bukan praktik kerja itu. Waktu itu kita baru sekolah tentang...

VOKASI

Pendidikan Karakter Penentu Mutu

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pendidikan vokasi di Indonesia harus mengutamakan pendidikan karakter dalam proses belajar-mengajar. Dengan menitikberatkan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama, lembaga pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang terampil sekaligus beretos kerja tinggi.

Semua aturan itu bertujuan menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki keterampilan dan siap kerja.

proses pendidikan di ATMI Contohnya, bila ada mahasiswa yang terlambat mengikuti perkuliahan, mereka akan diberikan sanksi praktik kerja dengan waktu dua kali lebih lama dibandingkan harus keterlambatan. "Jadi, masalah kita lebih 15 menit, sandakanya adalah praktik kerja setengah jam. Waktu itu kita merasa kayak di sekolah tentang..." ujarnya.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Bentuk kedisiplinan lain, katanya, adalah sanksi tegas bagi mahasiswa yang melanggar di bawah standar. "Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus di tingkat satu, mereka langsung dikeluarkan," kata Teguh.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.

Umatkan karakter
Teguh Romo Casutt, a proses pendidikan di ATMI adalah berfokus pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. "Kita harus mengutamakan pendidikan karakter sebagai salah satu materi utama," ujarnya.



Revolusi, 30 cm x 42 cm



DANA PENDIDIKAN

Menkeu: Anggaran Tersedia untuk Riset Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola dana abadi pendidikan untuk mendukung penelitian, pendidikan tinggi, dan vokasi disiapkan dan ditinjau. Dengan dana abadi pendidikan, Indonesia punya ruang untuk terus meningkatkan sumber daya manusia berkualitas.

Menkerti Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara pengumuman kerja sama dan pengumuman kepada 11 proyek kolaborasi riset dasar internasional oleh Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Newton Fund di Jakarta, Kamis (3/1), menyatakan komitmen pemerintah untuk mendukung riset berkualitas dan bertarif internasional. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia menyalurkan dana abadi pendidikan sekitar Rp 100 triliun.

"Dengan dana abadi, ada ruang untuk mendukung hal yang fundamental, seperti penelitian dasar. Jika sebuah program riset tak ada dalam anggaran rutin tetapi dianggap prioritas, dana abadi bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, selama ini sering diperdebatkan mana yang harus lebih dulu diprioritaskan antara riset dasar atau terapan. Karena itu pemerintah mendukung masalah yang akan disiapkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan IMPI untuk membentuk ekosistem penelitian di Indonesia.

Ia mengatakan, Lembaga Penyelidikan Keasusuaan Pendidikan S-2 dan S-3 di dalam dan luar

negari untuk sekitar 18.000 anak bangsa. Demikian juga untuk dukungan riset. "Namun, ada yang harus dibenahi. Untuk rehabilitasi sekolah riset yang ada pakai dana LPDP tak boleh lagi. Anggaraninya sudah ada di abadi fangs pendidikan," katanya.

11 proyek terpilih

Pendanaan IMPI didukung LPDP di bawah Kementerian Keuangan bersama Newton Fund menyokong dana 52 juta poundsterling selama 2-3 tahun ke depan untuk 11 proyek terpilih.

Riset besar bertarif internasional ini dilakukan secara kolaboratif antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian Indonesia dan Inggris. Penelitian meliputi bidang kesehatan, seperti demam berdarah, tuberkulosis, malaria, hepatitis B dan arbovirus. Di bidang lingkungan, studi masalah gambut, mangrove, dan kebakaran hutan.

Data Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste. Masyarakat Malik mengaitkan Indonesia punya kekayaan alam, budaya, dan manusia sebagai modal untuk maju. Namun, Indonesia menghadapi tantangan, seperti penyebaran penyakit malaria dan kebakaran hutan.

Deputi Eksekutif IMPI Teguh Rahardjo mengatakan, proyek riset kolaboratif antara peneliti Indonesia dan Inggris ini mempresentasikan proyek riset dasar yang terpadu dalam bidang masing-masing. (EKN)

Silahkan Riset, 30 cm x 42 cm

Sebagian Layanan Publik AS Mandek

Penghentian operasional pemerintah menunjukkan kegagalan Presiden AS Donald Trump kala berunding.



**Make
America
Great
Again !!!**

**Apa
Artinya
Nang??**

**Layanan
Publik
AS Mandek**



Mandek, 30 cm x 42 cm

Kepustakaan

- Ajidarma, Seno Gumira. 2012. *Antara Tawa dan Bahaya, Kartun Dalam Politik Humor*. Jakarta :Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nuriarta, I. W., & Bayu Artha, I. G. A. I. 2017. *Bahasa Rupa Kartun Konpopilan Pada Koran Kompas Tahun 2016*. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Institut Seni Indonesia Denpasar, 5. Retrieved from <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/segarawidya/article/view/191>
- Setiawan, Muhammad Nashir. 2002. *Menakar Panji Koming, Tafsiran Komik Karya Dw Koendoro Pada Masa Reformasi Tahun 1998*. Jakarta: Buku Kompas
- Sibarani, Augustin. 2001. *Karikatur dan Politik*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Pramoedjo, Pramono R. 2008. *Kiat Mudah Membuat Karikatur*. Jakarta: Creativ Media
- Wijana, I Dewa Putu. 2003. *Kartun*. Yogyakarta: Ombak



PENULIS

I Wayan Nuriarta, S.Pd.,M.Sn. yang memiliki akun *Facebook* Nuriarta dan *Instagram* Nuriarta_Cartoon adalah dosen di Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar yang beralamat di Jalan Nusa Indah Denpasar-BALI. Aktif menulis artikel berkaitan dengan kartun dan karya seni rupa pada *Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional* di beberapa perguruan tinggi, serta menulis artikel di website Kampus ISI Denpasar. Dua kali penelitiannya berkaitan dengan kartun dan seni rupa lolos didanai oleh Institusi tempatnya mengajar, dan sekarang sedang melakukan penelitian kartun komik sebagai pemenang hibah DRPM Kemenristekdikti. Selain menulis, ia juga aktif membuat karya kartun. Karya-karyanya telah dimuat di media massa cetak seperti *Koran Bali Post* dan *Koran Jawa Pos*. Saat ini karya-karya kartunnya dibahas sebagai penelitian oleh mahasiswa program Doktorat Lingustik Universitas Udayana Bali. Nuriarta aktif mengikuti pameran kartun, baik tingkat lokal, nasional maupun pameran kartun lintas negara. Pun aktif sebagai juri lomba yang berkaitan dengan Komunikasi Visual/Kartun.

UNDANG-UNDANG ANTIKRITIK DPR BERLAKU

UNDANG-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3 efektif berlaku se-Kanis pekan lalu. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia memomornya sebab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Kementerian Hukum mengesahkan peraturan tersebut meski Presiden Joko Widodo tak menandatangani.

"Kerapa tidak saya tanda tangani, karena menganggap kerangka yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun 1 Kota Serang, Banten, Rabu pekan lalu.

UNDANG-UNDANG ANTIKRITIK DPR BERLAKU

UNDANG-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah atau Undang-Undang MD3 akan berlaku sejak Kamis pekan lalu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memomornya sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Kementerian Hukum mengesahkan peraturan tersebut meski Presiden

Joko Widodo tak menandatangani.

"Kerapa tidak saya tanda tangani, karena menganggap kerangka yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun 1 Kota Serang, Banten, Rabu pekan lalu.



berita 2018

Politik & Hukum
3

Presiden Ingin Polri Tuntaskan Isu Hoaks

Hoaks dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu hoaks harus dituntaskan.

berita 2018

Tolak Adu Domba

Pimpinan ormas Islam Pembakaran Bendera

POKOKNYA KITA JANGAN MAU DIADU BRO.....

Indonesia tetap berkeadilan oleh Allah

berita 2018

"Persoalan kartun agar tetap kelihatan hidup dan terkesan bicara tidak hanya ditekankan pada garis gambar kartun melainkan pada kekuatan satuan lingual yang dihasilkan oleh tuturan yang ada tokoh kartun. Kartun tidak hanya dijadikan sarana untuk humor yang menggelitik namun harus cerdas dan kartun yang cerdas adalah ciri karya wacana kartun Nuriarta"

"Nuriarta lihai dalam menjaga kesopanan dan kesantunan lewat gambar tokoh kartun yang dihadirkan. Nuriarta sangat menjaga "muka" tokoh yang dituturkan serta secara sengaja memplesetkan maksud tuturan agar oknum, kelompok dan individu yang dibicarakan tetap terjaga mukanya di hadapan publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra diri tokoh yang dituturkan dan tidak terkesan mengeksplorasi opini pro dan kontra yang dimunculkan oleh pihak kartunis itu sendiri".

(Komang Andri Sani, Mahasiswa Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana)

Nuriarta BERHASIL, meengartunkan sebuah peristiwa yang sekaligus menghadirkan saksi-saksinya (berupa klipng-kliping Koran tersebut). Gesitnya Nuriarta mencari informasi seputar dunia kartun Tanah Air pada langkah selanjutnya sangat saya apresiasi sebagai langkah positif membangun Kreatif-ART-nya. Mengikuti Borobudur Cartoon Forum 2 (BCF2), Pameran dan menulis seputar dunia kartun sungguh membuat saya ikut lega sebagai bagian generasi old dunia kartun Indonesia!

(Drs. Made Gede Parama Artha-Presiden Kartun Indonesia 2005-2010)

ISBN 978-602-51033-9-1

